



**ANALISIS KORUPSI TERHADAP INDIKATOR  
MAKROEKONOMI DI ASEAN 3**

**SKRIPSI**

Oleh

**Zannatul Maulida**

**NIM 130810101116**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**ANALISIS KORUPSI TERHADAP INDIKATOR  
MAKROEKONOMI DI ASEAN 3**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Zannatul Maulida**

**NIM 130810101116**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT, atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada saya, serta atas seluruh perjuangan, kerja keras, pengorbanan, serta penantian atas sebuah kesabaran dari tantangan yang ada, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Ima Malini, Ayahanda Sutrisno tercinta dan tersayang, yang telah mencurahkan segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada terhingga untuk mencapai asa dan cita serta seluruh pengorbanan yang tcurahkan selama ini;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya lah kami akan kembali”

(QS. Al-Baqarah: 155-156)

Ikhlas dan tauhid adalah pohon yang di tanam hati, Amal perbuatan adalah cabang-cabangnya, sedangkan buah-buahnya adalah kehidupan yang baik di dunia dan kenikmatan abadi di alam akhirat.

(Ibnul-Qayyim)

Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cermelang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.

(Buya Hamka)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zannatul Maulida

NIM : 130810101116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “*Analisis Kausalitas Korupsi Terhadap Indikator Makroekonomi di ASEAN 3*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember,  
Yang menyatakan,

Zannatul Maulida  
130810101116

**SKRIPSI**

**ANALISIS KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP INDIKATOR  
MAKROEKONOMI DI ASEAN 3**

Oleh:

**Zannatul Maulida**  
**NIM 130810101116**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Lilis Yuliati S.E., M.Si.  
Dosen Pembimbing Pendamping : Dr. Herman Cahyo Diartho S.E., M.P.

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Kausalitas Korupsi Terhadap Indikator  
Makroekonomi di ASEAN 3.

Nama Mahasiswa : Zannatul Maulida

NIM : 1308101011116

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Moneter

Tanggal Persetujuan : 28 Oktober 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Lilis Yulianti S.E.,M.Si.

NIP. 19690718 199512 2 001

Dr. Herman Cahyo Diartho S.E.,M.Si.

NIP. 19720713 199903 1 001

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.

NIP. 19641108 198902 2 001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP INDIKATOR  
MAKROEKONOMI DI ASEAN 3**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zannatul Maulida

NIM : 130810101116

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

1. Ketua : Dr. Regina Niken Wilantari.,M.Si. (.....)  
NIP. 19740913 200112 2 001
2. Sekretaris : Dr. Rafael Purnomo S., M.Si. (.....)  
NIP. 19581024 198803 1 001
3. Anggota : Drs. P. Edi Suswandi, MP. (.....)  
NIP. 19550425 198503 1 001

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

FOTO 4 X 6  
WARNA

Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak. C.A  
NIP. 19710727 199512 1 001



*Analisis Kausalitas Korupsi Terhadap Indikator Makroekonomi di ASEAN 3*

**Zannatul Maulida**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan masalah umum global dan isu politik utama yang sedang berjalan dan menjadi fokus dari studi Bank Dunia dan studi akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara korupsi terhadap indikator makroekonomi di ASEAN 3 periode tahun 2000-2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks persepsi korupsi, PDB perkapita dan Investasi asing langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series*. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kausalitas Granger. Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda di tiga negara ASEAN. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara korupsi dan indikator makroekonomi di Filipina. Hasil analisis di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara indikator makroekonomi dan korupsi.

**Kata Kunci :** ASEAN 3, Korupsi, Indikator Makroekonomi, kausalitas Granger.

*An Analysis of Corruption Causality Towards The Indicators of Macroeconomy in  
ASEAN 3*

**Zannatul Maulida**

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and  
Business, University of Jember*

**ABSTRACT**

*Corruption is a common global problem and major ongoing political issues and the focus of the World Bank study and academic studies. This study aims to determine the causality relationship between corruption on macroeconomic indicators in ASEAN 3 period 2000-2016. The variables used in this research are corruption perception index (CPI), GDP per capita, and Foreign Direct Investment (FDI). The type of data used in this study is secondary data in the form of time series data. The method of analysis used is Granger causality analysis method. The estimation result form this study show different result in the three ASEAN countries. The analysis shows that there is one-way causal relationship between corruption and macroeconomic indicators in Philippines. Results of analysis in Indonesia and Thailand show that here is a one-way relationship of mutuality between macroeconomic indicators and corruption.*

**Key words :** ASEAN 3, Corruption, Macroeconomic Indicators, Granger causality

## RINGKASAN

**Analisis Kausalitas Korupsi Terhadap Indikator Makroekonomi di ASEAN 3, Zannatul Maulida, 1301810101116; 2017:99 Halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.**

Korupsi merupakan fenomena sosial yang menjadi masalah umum global, yang hingga saat ini masih belum dapat diberantas secara maksimal. Korupsi berada diberbagai lapisan tempat dan tidak ada cara yang mudah untuk memberantasnya. Dampak dari korupsi tidak hanya mengancam sistem kenegaraan. Tetapi juga, menghambat pembangunan dan mengikis perekonomian, distribusi sumber daya, dan administrasi publik. Dari semua laporan data negara yang tersedia menunjukkan bahwa korupsi tetap meluas dan menyerap di semua lapisan masyarakat. Beberapa tahun terakhir upaya anti-korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi yang kuat telah menyadarkan beberapa pejabat tinggi publik, akantetapi kurangnya kapasitas kelembagaan dan lemahnya supermasi hukum yang dikombinasi dengan miskinnya kualitas regulasi masih menjadi alasan kuat bagi terjadinya korupsi.

Investasi asing langsung (FDI) pada umumnya dianggap sebagai faktor penting dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Selain itu, investor asing langsung sering berinteraksi dengan pejabat pemerintah yang berbeda disetiap negara tuan rumah. Misalnya, dalam mendapatkan izin, memastikan perlindungan hak kepemilikan, dan mendirikan kontrak investasi di negara tuan rumah yang sangat korup, pejabat pemerintah menentukan secara tidak hati-hati dalam meminta pembayaran dengan jumlah yang besar untuk ketentuan barang publik. Suap, misalnya yang terkait dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai sumber pendapatan alternatif tetapi tidak sah, dapat menyebabkan ketidakseimbangan di sektor perekonomian.

Investor asing cenderung menghadapi peraturan birokrasi seperti itu di banyak negar berkembang. Intinya korupsi dapat berdampak negatif, positif atau netral mempengaruhi FDI dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Keterbatasan literatur teoritis tentang peran korupsi dalam hubungan pertumbuhan

FDI, menunjukkan bahwa dalam seluruh kemungkinan pendekatan mungkin lebih tepat dan kredibel untuk memperkirakan dampak korupsi terhadap imbal hasil FDI di berbagai negara berkembang.

Literatur teori berpendapat bahwa korupsi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi dan sebagian besar literatur empiris mempelajari hubungan antar korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang juga tidak memberi kejelasan. Pengaruh positif atau negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada negara dan konteks regional. Salah satu kawasan yang menarik diteliti adalah kawasan ASEAN. Kemudian negara yang digunakan untuk obyek penelitian yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Berdasarkan karakteristik dari penyebab adanya korupsi ketiga negara tersebut memiliki kesamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas korupsi terhadap GDP dan FDI di negara ASEAN 3. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Kausalitas Granger. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hasil estimasi dari penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda di tiga negara ASEAN. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara korupsi dan indikator makroekonomi di Filipina. Hasil analisis di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa terdapat hubungan kasualitas satu arah antara indikator makroekonomi dan korupsi.

## PRAKATA

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kausalitas Korupsi Terhadap Indikator Makroekonomi di ASEAN 3”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan barbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lilis Yuliati S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, pengarahan saran serta kritik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ketua dan Seketaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Seluruh Dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya Jurusan IESP yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;
7. Ibunda Ima Malini dan Ayahanda Sutrisno, terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, kasih sayang, kerja keras, kesabaran dan atas

segala pengorbanan yang telah diberikan selama ini untuk dapat memberikan penghidupan yang terbaik kepada ananda. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tak terkira dan tak terbalaskan. Maafkan jika ananda masih belum bisa membahagiakan ayah dan ibu. Terima kasih telah mendampingi ananda hingga mampu menggapai kesuksesan di masa depan ;

8. Adikku tersayang Arda Siti Zahiro dan Nurbadria Maulidia, terima kasih atas segala warna kehidupan, dukungan, semangat, dan doanya hingga saat ini. Semoga suatu saat nanti, kakak bisa membahagiakan kalian;
9. Untuk Nenek, Kakek, Pakdhe, Budhe, Om, Tante serta sepupu-sepupu keluarga besarku baik yang di Jember maupun di Situbondo, terima kasih atas segala doa dan dukungannya;
10. Sahabat-sahabatku Mbak iim, Ima, Ceza, Fatim, Cita, Retno, Qory, Hani, Tyas, Rita, Putri, Ida, Lilis, Selly, dan Nadya terima kasih telah menjadi saudara membagi pengalaman hidup, tempat berbagi cerita, menerima keluh kesah, menikmati canda tawa dan suka duka bersama.
11. Sahabatku sewaktu SMA Nia, Dita, Pabais, Rista, Fatimah, Nurul, Uti, Zen, Mahfud, Alvi, Mamat, Herman, Hasan, Ababil terima kasih atas semua kenangan, canda dan tawa;
12. Teman-teman satu angkatan jurusan IESP, khususnya konsentrasi moneter angkatan 2013 (*Monetary's Family 2013*), terima kasih atas semua kenangan, canda dan tawa;
13. Teman-teman kelompok KKN 076 kecintaanku Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, terimakasih atas dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. Teman-teman kos tercinta, Ceza, Ima, Rifa, MbK lely, MbK Ana, Mila, Adek Ima, MbK Wahyu, MbK Yuyun, MbK Susan, Nira, Nila, Vega, Alis, Adek Mifta, dan Adek Roro terimakasih telah menjadi teman setiap selama di Jember.
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah Anda berikan. Penulis berharap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, Desember 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN_MOTTO .....	iv
HALAMAN_PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vii
HALAMAN_PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
RINGKASAN .....	xi
PRAKATA .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Perspektif Teori dalam Korupsi.....	13
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Eksogen .....	16
2.1.3 Teori Ketidakpastian Keynes.....	18
2.1.4 Teori Resiko Politik.....	19
2.1.5 Teori Investasi.....	20
2.2 Penelitian Sebelumnya .....	25



2.3 Kerangka Konseptual .....	31
2.4 Hipotesis Penelitian .....	33
2.5 Asumsi Penelitian .....	33
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.2 Desain Penelitian .....	35
3.3 Metode Analisis Data .....	36
3.3.1 Uji Akar Unit ( <i>Unit Root test</i> ) .....	36
3.3.2 Uji Kausalitas Granger .....	38
3.4 Definisi Operasional .....	43
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Konfigurasi perkembangan Indikator Makro Ekonomi ASEAN 3 .....	45
4.1.1 Dinamika Korupsi di ASEAN 3 .....	46
4.1.2 Dinamika Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 3 .....	50
4.1.3 Dinamika Investasi Asing Langsung (FDI) di ASEAN 3 .....	51
4.2 Analisis Kausalitas Korupsi , GDP dan FDI di ASEAN 3 .....	54
4.2.1 Hasil Uji Akar Unit ( <i>Unit Root Test</i> ) .....	54
4.2.2 Hasil Uji Kausalitas Granger ( <i>Granger Causality Test</i> ) .....	60
4.3 Pembahasan .....	63
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

**DAFTAR TABEL**

**Halaman**

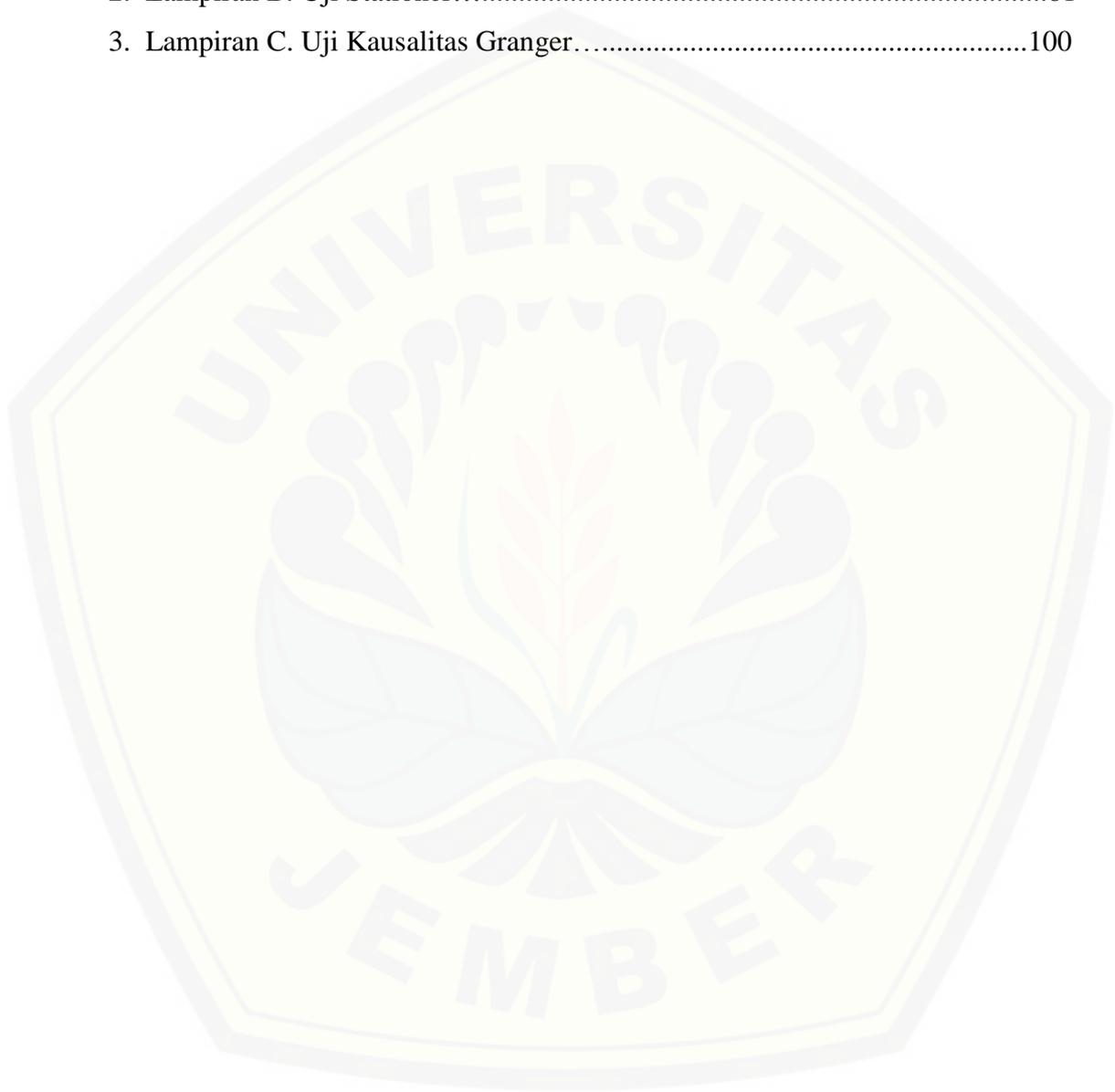
2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya.....	28
4.1 Sepuluh Negara Paling Korupi di Dunia.....	47
4.2 Sepuluh Negara Terbersih dari Korupsi di Dunia.....	48
4.3 Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan <i>Uji Augmented Dickey Fulier</i> di Indonesia.....	55
4.4 Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan <i>Uji Augmented Dickey Fulier</i> di Thailand.....	57
4.5 Uji Akar-akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan <i>Uji Augmented Dickey Fulier</i> di Filipina.....	58
4.6 Hasil estimasi Uji Kausalitas Granger variabel GDP, FDI dan CPI di Indonesia.....	60
4.7 Hasil estimasi Uji Kausalitas Granger variabel GDP, FDI dan CPI di Thailand.....	62
4.8 Hasil estimasi Uji Kausalitas Granger variabel GDP, FDI dan CPI di Filipina.....	63

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1.1 Fenomena Korupsi di Tiga Negara ASEAN.....	2
1.2 Proporsi Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap GDP di Tiga Negara ASEAN.....	8
1.3 Dinamika GDP perkapita di Tiga Negara ASEAN.....	10
2.1 Kerangka Konseptual.....	31
3.1 Desain Penelitian.....	35
4.1 Klasifikasi Indeks Persepsi Korupsi di Dunia Berdasarkan Tingkatan Warna pada Tahun 2016.....	49
4.2 Dinamika GDP perkapita di Lima Negara ASEAN.....	50
4.3 Proporsi Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap GDP di Tiga Negara ASEAN.....	52

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Lampiran A. Data Penelitian.....	79
2. Lampiran B. Uji Stationer.....	81
3. Lampiran C. Uji Kausalitas Granger.....	100

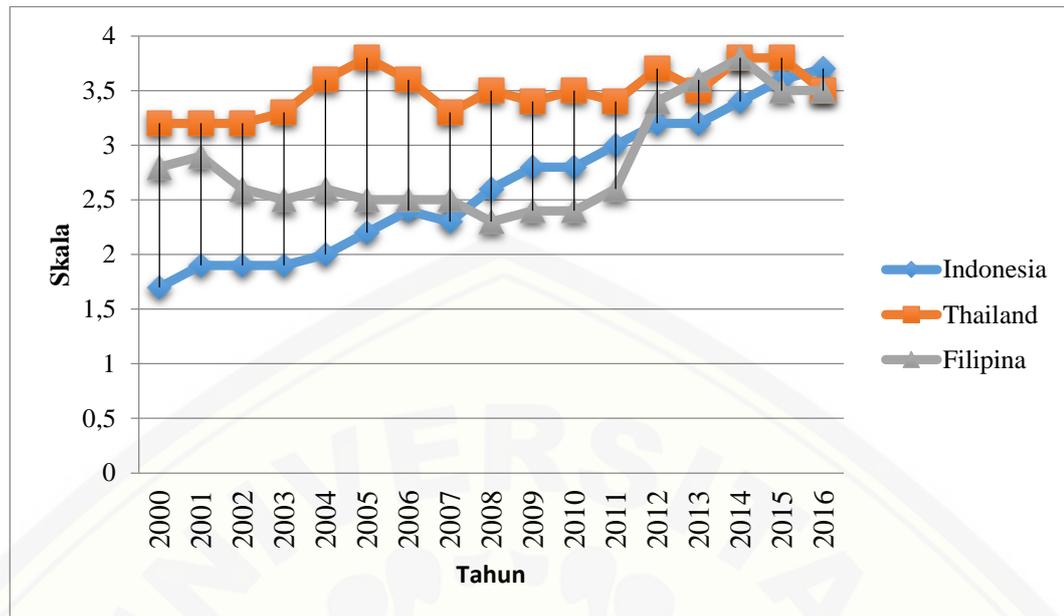


## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam suatu perekonomian, pengeluaran publik telah berubah menjadi bidang penelitian, transparansi anggaran menjadi prinsip utama dalam pengelolaan kinerja ekonomi. Warga dalam suatu negara memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelolah sumber daya publik. Korupsi memiliki banyak bentuk, seperti suap yang dibayarkan kepada pejabat pemerintah, dan penggelapan dana publik. Dengan demikian, secara luas korupsi pemerintah merupakan kendala serius untuk meningkatkan transparansi anggaran dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi merupakan masalah umum global (Huang, 2015) persepsi umum bahwa korupsi menghambat pembangunan ekonomi, perekonomian pasar negara berkembang dan negara maju yang demokratis telah mulai serius mempertimbangkan bahaya korupsi dan mulai berinvestasi di sumber daya, dalam mencegah dan mengendalikan korupsi.

Menurut *World Bank*, korupsi didefinisikan “*the abuse of public power for private benefit*”, penyalagunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi (Tanzi, 1998; USAID, 1999). Sebuah LSM internasional yang bergerak dibidang pemberantasan korupsi memberikan definisi mengenai korupsi yaitu “Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalagunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka” (*Transparency International*, 2002). Dimulai dengan (Mauro, 1995) studi empiris lintas negara menunjukkan bahwa korupsi yang parah secara signifikan menghalangi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Banyak studi empiris misalnya (Svensson, 2005; Asedu dan Freeman, 2009, Neanidis dan Haque; 2009) telah menunjukkan bahwa korupsi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan transparansi anggaran.



Gambar 1.1 Fenomena Korupsi di Tiga Negara ASEAN 2000-2016  
(Sumber: *Transparency International*, 2017)

Gambar 1.1 merupakan fenomena tingkat korupsi di tiga negara ASEAN yang diperoleh dari lembaga International yaitu *Transparansy International* yang menunjukkan tingkat korupsi di tiga negara ASEAN dengan indikator skala 0 sampai dengan 10 dimana jika skala 0 sangat korup sampai dengan skala 10 yang dapat dikatakan bersih tidak terjadi korupsi.

Diawal tahun 2000, negara indonesia memiliki indeks persepsi korupsi paling tinggi yang artinya memiliki resiko korupsi cukup tinggi. Disebabkan oleh kurang tereksplorasinya kasus korupsi di rezim otoriter pada kepemimpinan Soeharto. Ketidakstabilan politik dapat ditemui pada awal tahun 2000 sampai dengan 2004. Pergantian presiden Indonesia memang idealnya dilaksanakan setiap lima tahun namun pada kenyataannya pada kurun waktu tersebut terjadi empat kali pergantian presiden. Kondisi pemerintahan mulai stabil terhitung paska diadakan pemilu tahun 2004.

Sejak berakhirnya era Soeharto dan rezim pemerintahan Marcos di Indonesia dan Filipina, telah menegakkan transparansi dalam pemerintahan salah satunya melalui pendirian lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002. Lembaga anti korupsi di Thailand yaitu *The National Counter Corruption*

*Commission* (NCCC) didirikan pada tahun 1989. Dan lembaga anti korupsi di Filipina yaitu *Office of The Ombudsman* (OMB) didirikan pada tahun 1988.

Berdasarkan Gambar 1.1, menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di setiap negara pada tahun 2013 mengalami penurunan di tahun 2014, meskipun sebagian mengalami peningkatan, namun sebagian besar mengalami penurunan di beberapa poin sebelumnya. Di Indonesia dan Filipina, pada tahun 2013 sampai dengan 2014 indeks persepsi korupsi Indonesia dan Filipina mengalami peningkatan sebesar 0,2 point indeks persepsi korupsi Indonesia menjadi 3,4 dan indeks persepsi korupsi Filipina menjadi 3,8. Sedangkan, pada tahun 2013 sampai dengan 2014 indeks persepsi korupsi di Thailand mengalami peningkatan 0,3 point menjadi 3,8. Tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi antar negara yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1.

Kompleksitas korupsi dengan ekonomi yaitu perekonomian merupakan pembangunan yang kompleks dan terkait satu sama lain. Terdapat keterkaitan antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Suatu gangguan pada satu sektor, akan mengganggu perekonomian secara luas. Seperti gangguan dari korupsi yang menciptakan ketidakefisienan perekonomian secara luas.

*Multiplier effect* dari korupsi yaitu kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Dampak dari bocornya anggaran suatu negara yang mempengaruhi tingkat GDP yang sangat kompleks yang pada akhirnya merugikan keuangan dan perekonomian di suatu negara tersebut. Terdapat beberapa jenis biaya yang disebabkan oleh korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Biaya eksplisit korupsi adalah nilai uang yang dikorupsi secara pribadi maupun tidak, atau kerugian negara secara eksplisit.
- b. Biaya implisit adalah biaya oportunitas akibat korupsi termasuk beban yang di tanggung dimasa datang.
- c. Biaya antisipasi tindakan korupsi yaitu biaya untuk sosialisasi korupsi dan biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat perilaku korupsi.
- d. Biaya akibat reaksi terhadap korupsi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk biaya peradilan, biaya penyidikan, biaya operasional dan biaya perampasan aset baik yang didalam maupun di luar negeri.

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas secara maksimal. Korupsi ada diberbagai disuatu tempat dan tidak ada cara yang mudah untuk memberantasnya. Dampak dari korupsi tidak saja mengancam sistem kenegaraan. Tetapi, juga menghambat pembangunan dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu negara. Korupsi terus mengikis perekonomian, distribusi sumber daya, dan administrasi publik. Dari semua laporan data negara yang tersedia menunjukkan bahwa korupsi tetap meluas dan menyerap di semua lapisan masyarakat. Beberapa tahun terakhir upaya anti-korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi yang kuat telah menyadarkan beberapa pejabat tinggi publik, tetapi kurangnya kapasitas kelembagaan dan lemahnya supermasi hukum yang dikombinasi dengan miskinnya kualitas regulasi masih menjadi alasan kuat bagi terjadinya korupsi.

Penyebab korupsi bervariasi di seluruh negara tergantung dengan tujuan kebijakan nasional, sejarah, birokrasi tradisi, dan pembangunan politik. Beberapa studi menunjukkan korelasi antara korupsi dan PDB yang rendah, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan kurangnya kompetisi. Tetapi, arah korelasi antara korupsi dan berbagai faktor tidak jelas dan sulit untuk membedakan antara sebab dan akibat dari korupsi. Bahwa korupsi juga berkorelasi dengan serangkaian struktural dan institusional seperti faktor ukuran pemerintah, tingkat dan bentuk desentralisasi, kualitas regulasi, pelayanan administrasi publik, sipil dan politik. Beberapa ilmuwan telah mengembangkan model teoritis dalam menjelaskan faktor-penentu korupsi. Klitgaard (1998) berfokus pada analisis peluang korupsi berdasarkan persamaan bahwa korupsi sama dengan sewa ditambah kebijakan dikurangi akuntabilitas ( $C=R+D-A$ ). Model Klitgaards' mungkin membantu untuk memahami penyebab korupsi dalam kasus individu.

Beberapa penelitian lintas-negara menyelidiki penyebab korupsi telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin berdampak pada korupsi, mulai dari faktor struktur, faktor institusional, sejarah dan ekonomi. Namun, tidak banyak studi tingkat negara menjelajahi penyebab korupsi dalam konteks tertentu.



Pervasiveness korupsi yang tinggi telah menyiksa di banyak negara berkembang (Asongu 2013; Cameron *et al.* 2009). Efek negatif korupsi mempengaruhi daya saing suatu bangsa dengan tidak hanya mengurangi investasi keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menyebabkan ketidakseimbangan pengeluaran, intensif pasar sesaat dan alokasi sumber daya nasional yang buruk (Tanzi, 1998; Rose-Ackerman, 1999). Studi (Monte dan Papagni, 2001) melihat pada kasus kota Italia menunjukkan bahwa korupsi secara langsung tidak hanya membatasi pendapatan rata-rata tenaga kerja, tetapi juga mengurangi investasi swasta, yang pada gilirannya, mengurangi efisiensi pengeluaran investasi publik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Studi (Ajilore dan Elumilade, 2007) menunjukkan bahwa korupsi adalah kointegrasi pertumbuhan ekonomi di Nigeria, dimana terdapat kausalitas negatif satu arah dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi (Tsaturyan dan Bryson, 2009) menyelidiki hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di 39 negara di Armenia ditemukan bahwa korupsi menghambat kinerja ekonomi. Maiyaki (2010) berpendapat bahwa korupsi memperlambat pertumbuhan, mengarah pada investasi yang tidak efisien dalam proyek publik dan memperlambat investasi asing. Korupsi memainkan peran penting dan kausal dalam menurunkan pertumbuhan dan investasi di setiap negara (Johnson *et al.* 2011). Efek negatif dari korupsi pada pertumbuhan ekonomi terutama ditularkan oleh dampak pada modal manusia dan ketidakstabilan politik (Dridi, 2013). Studi (Shera *et al.* 2014) dengan menggunakan analisis data panel, mengungkapkan bahwa hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi.

Literatur teori berpendapat bahwa korupsi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi, baik dalam modal fisik maupun manusia (Mauro, 1995; Keefer and Knack, 1997; Porson, 1998; Leite dan Weidman, 1999; Reinikka dan Svensson, 2005) dan sebagian besar literatur empiris mempelajari hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi juga tidak memberi kejelasan dan jawaban ambigu dari pertanyaan apakah korupsi

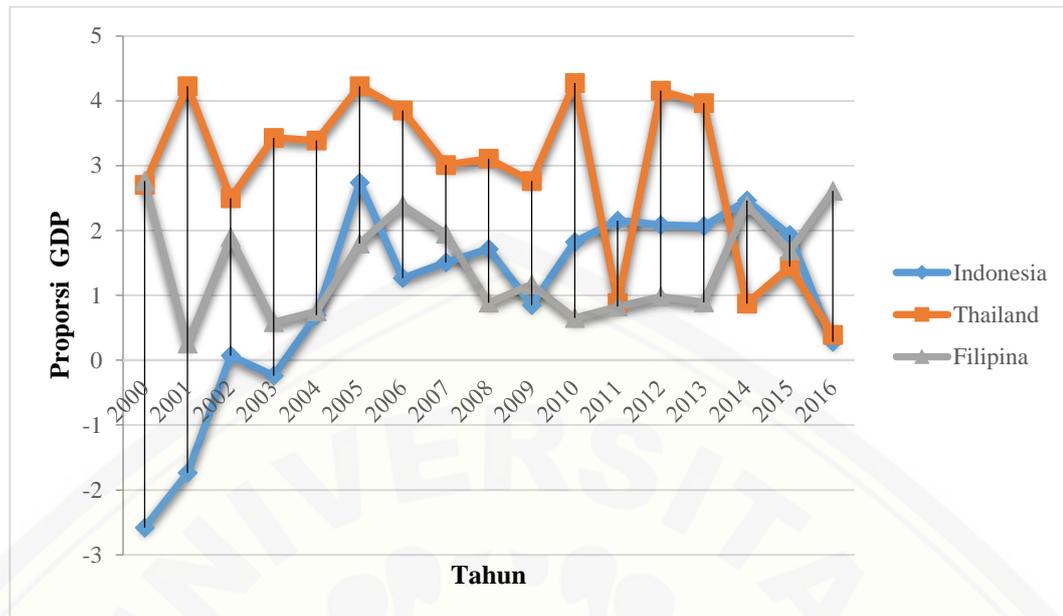
mempengaruhi pertumbuhan positif atau negatif (Mauro, 1995; Svensson, 2005; Meon dan weill, 2008; Aidt, 2009; Paul, 2010). Meskipun sebagian besar studi setuju bahwa pengaruh negatif korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun beberapa peneliti percaya bahwa korupsi memiliki efek sebaliknya. Lebih khususnya, beberapa peneliti percaya korupsi meningkatkan efisiensi administrasi instansi pemerintah dan mengurangi transaksi biaya waktu, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam keadaan tertentu, individu atau perusahaan mungkin menyuap para pembuat kebijakan untuk berbalik situasi yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh hukum yang ada dan peraturan dan inflexibilitas politik, yang pada gilirannya berakhir mempromosikan efisiensi ekonomi (Leff, 1964; Bayley, 1966; Huntington, 1968). Faktanya dalam penelitian (Lui, 1985) menunjukkan bahwa suap politik telah menyebabkan proses politik dipersingkat. Demikian pula, (Klitgaard, 1988; Acemoglu dan Verdier, 1998) dengan menggunakan model teoritis membuktikan bahwa ketika bangsa sedang mengejar untuk memaksimalkan output nasional dan tingkat optimal korupsi ada. Banyak negara menikmati pertumbuhan ekonomi yang cepat meski menghadapi korupsi (Wedeman, 1997). Negara berkembang tertentu atau negara totaliter, korupsi membantu menghilangkan faktor-faktor tertentu yang menghambat pertumbuhan ekonomi (Colombatto, 2003). Dampak korupsi terhadap pertumbuhan secara statistik tidak penting (Glaeser dan Saks, 2006; Treisman, 2007). Demikian pula, (Paul, 2010) menemukan bahwa Bangladesh, terdapat hubungan positif antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun persepsi umum bahwa korupsi tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi, beberapa ekonom percaya bahwa korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan pada kasus tertentu (Colombatto, 2003; Huntington, 1968; Leff, 1964; Lui, 1985; Paul, 2010; Swaleheen, 2011; Wedeman, 1997). Beberapa temuan hubungan inklusif antara korupsi dan pertumbuhan (Glaser 7 Saks, 2006; Treisman, 2007) menemukan bahwa ada tingkat optimal korupsi untuk memaksimalkan output (Acemoglu dan Verdier, 1998; Dzhumashev, 2014; Klitgaard, 1998).

Pengaruh positif atau negatif dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada negara dan konteks regional (Virta, 2010). Dengan beberapa pengecualian, fokus utama dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak korupsi terhadap pertumbuhan, dilihat dari beberapa variabel lain yang mempengaruhi dan berdasarkan kategori korupsi di suatu negara. Korupsi bukan hanya mencakup dalam suatu aspek perekonomian, melalui sumber pendapatan negara yang berkurang. Permasalahan korupsi juga mencakup aspek sosial budaya, politik, dan hukum. Adanya korupsi mengakibatkan gangguan terhadap pertahanan negara, melalui wewenang dalam suatu negara untuk mengatur kebijakan sesuai dengan tujuan nasional.

Arus FDI negara-negara emerging Asia telah meningkat sejak awal tahun 1990an. Sebagai bentuk aliran yang bersifat jangka panjang dan relatif untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di negara-negara emerging Asia. Secara konseptual, pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI, dibanding bentuk modal lainnya di suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (*pull factors*) maupun kondisi dan strategi dari penanaman modal asing (*push factors*). *Pull factors* dari masuknya FDI antara lain terdiri dari kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan liberalisasi FDI (di dalam bentuk intensif investasi). Sedangkan yang termasuk dalam *pull factors* antara lain strategi investasi maupun strategi produksi dari penanam modal, serta persepsi resiko terhadap negara penerima.



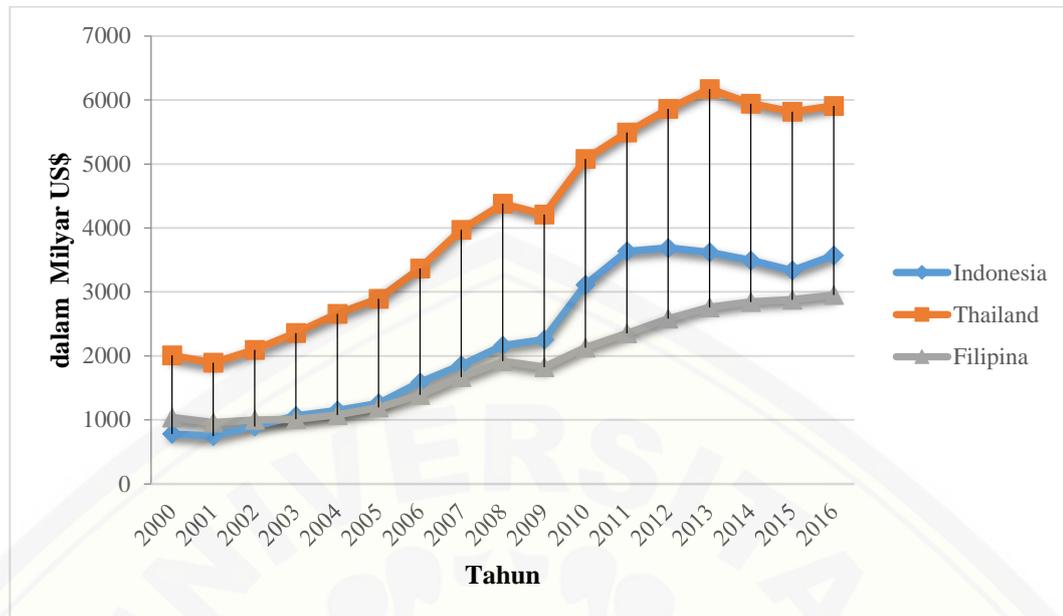
Gambar 1.2 Proporsi Investasi Asing Langsung (FDI) terhadap GDP di Tiga Negara ASEAN Tahun 2000-2016 (Sumber: UNCTAD, 2017)

Sementara itu, aliran masuk FDI ke negara-negara berkembang meningkat pesat sejak awal tahun 1990 dan mencapai puncaknya pada tahun 2006. Negara berkembang di Asia merupakan kawasan yang menjadi penerima net FDI terbesar di antara kawasan negara-negara berkembang lainnya, yaitu mencakup sekitar 50% dari total FDI ke kawasan negara-negara berkembang di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia menjadi penarik utama masuknya aliran FDI ke wilayah tersebut, terutama berkaitan dengan motif perluasan target pasar. Peningkatan aliran FDI ke negara Asia Tenggara merupakan peningkatan terbesar di Asia yang disumbangkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Aliran masuk FDI ke Thailand mengalami peningkatan dari US\$ 1,4 triliun di tahun 2004 menjadi US\$ 3,7 triliun di tahun 2005, bahkan Indonesia mengalami peningkatan sampai dengan 17% di tahun 2005. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki biaya produksi yang rendah sehingga membuat investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya. FDI di Indonesia, Thailand, dan Filipina selalu berfluktuasi.

Investasi langsung asing (FDI) pada umumnya dianggap sebagai faktor penting dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Selain itu, investor asing langsung sering berinteraksi dengan pejabat pemerintah

yang berbeda disetiap negara tuan rumah. Misalnya, dalam mendapatkan izin, memastikan perlindungan hak kepemilikan, dan mendirikan kontrak investasi. Di negara tuan rumah yang sangat korup, pejabat pemerintah menentukan secara tidak hati-hati dalam meminta pembayaran yang besar untuk ketentuan barang publik. Suap, misalnya yang terkait dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai sumber pendapatan alternatif tetapi tidak sah, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hasil relatif antara produktif dan tidak produktif disektor perekonomian. Korupsi juga diperdebatkan dalam menggagalkan peraturan birokrasi yang tidak efisien, yang sebaliknya akan menghambat efisiensi alokasi sumber daya ( Leff, 1964; Huntington, 1968). Investor asing cenderung menghadapi peraturan birokrasi seperti itu di banyak negara berkembang. Intinya, korupsi dapat berdampak negatif, positif atau netral mempengaruhi FDI dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

Dengan demikian, keterbatasan yang ada dari literatur pertumbuhan FDI, ditambah dengan tidak adanya konsensus dalam literatur teoritis tentang peran korupsi dalam hubungan pertumbuhan FDI, menunjukkan bahwa dalam seluruh dan kemungkinan pendekatan mungkin lebih tepat dan kredibel untuk memperkirakan dampak korupsi terhadap imbal hasil FDI di berbagai negara berkembang. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah mengidentifikasi hubungan heterogenitas antara FDI dan pertumbuhan ekonomi ( Blomstrom, 1986; Balasubramanyam *et al.* 1996; Borensztein *et al.* 1998, Alfaro *et al.* 2004), serta studi yang telah menunjukkan interaksi penting antara faktor kelembagaan (seperti korupsi) dan efektivitas FDI pada peningkatan tingkat pertumbuhan (Durham, 2004; McCloud dan Kumbhakar, 2012), kami menyajikan generalisasi empiris model pertumbuhan untuk melakukan reanalisis menyeluruh mengenai hubungan antara korupsi, FDI, dan GDP.



Gambar 1.3 Dinamika GDP perkapita di Tiga Negara ASEAN Tahun 2000-2016  
(Sumber: *World Bank*, 2017)

Tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan di tiga negara ASEAN selama 10 tahun terakhir secara konsisten melebihi rata-rata pertumbuhan pada umumnya. Pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi terdapat permasalahan internal yang menaungi pemerintah di sektor publik yaitu tingkat korupsi yang tinggi. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian yang dapat diwakili oleh anggaran publik terhadap GDP dapat memperkuat tingkat korupsi. Secara khusus, Elliot (1997) menunjukkan bahwa tingkat korupsi meningkat dengan tingkat anggaran pemerintah relatif terhadap GDP. Keterlibatan pemerintah dapat mempromosikan monopoli, dan mencegah kompetisi terbuka dan adil di antara pelaku usaha, perkembangan tersebut yang akan mendorong korupsi.

Salah satu kawasan yang menarik untuk diteliti adalah kawasan ASEAN, kawasan ASEAN merupakan himpunan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Kemudian negara yang digunakan untuk obyek penelitian yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Hal ini didasarkan atas kesamaan struktur perekonomian dan merupakan negara berkembang dan karakteristik dari penyebab korupsi dari ke tiga negara ASEAN tersebut tidak terlalu jauh berbeda.

Demikian pula, menanggapi peningkatan kesadaran hubungan potensial antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, organisasi internasional telah menetapkan berbagai rencana anti-korupsi. Hubungan antar korupsi dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi topik yang sedang berlangsung dalam perdebatan akademisi. Memperhatikan atas efek bahaya yang disebabkan oleh korupsi pada pertumbuhan ekonomi. Korupsi merupakan isu politik utama yang sedang berjalan dan diskusi publik dan menjadi fokus dari studi Bank Dunia dan studi akademik lokal (*World Bank*, 2003; Kuncoro, 2003). Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan berfokus pada hubungan kausalitas korupsi dengan indikator makroekonomi di tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, banyak literatur empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan antara korupsi dan indikator makroekonomi di ASEAN 3. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan kausalitas korupsi terhadap GDP di Indonesia, Thailand dan Filipina?
2. Bagaimana hubungan kausalitas korupsi terhadap FDI di Indonesia, Thailand dan Filipina?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Terkait permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas korupsi terhadap GDP di Indonesia, Thailand dan Filipina.
2. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas korupsi terhadap FDI di Indonesia, Thailand dan Filipina.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambahkan informasi mengenai dinamika korupsi di tiga negara ASEAN.
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah terkait penerapan kebijakan yang berkaitan dengan korupsi dan perekonomian.

b. Manfaat teoritis

- 1) Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang ilmu ekonomi dan studi pembangunan.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan latihan pembelajaran dalam menerapkan teori dan studi empiris yang telah diperoleh.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 akan memaparkan secara rinci mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut mencakup perspektif teori dalam korupsi, teori pertumbuhan ekonomi, teori ketidakpastian keynes, teori resiko politik, teori investasi. Bab 2 juga menyajikan ringkasan penelitian sebelumnya, kerangka konseptual penelitian yang menggambarkan alur dari penelitian.

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Perspektif Teori dalam Korupsi

Definisi korupsi menurut perspektif hukum telah dijelaskan dalam pasal UU anti korupsi No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat sembilan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, *secret transaction*, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Dimana definisi menurut UU tersebut cenderung terbatas dalam sektor publik, tidak mencakup korupsi oleh pihak swasta dan tidak memasukkan unsur pencucian uang sebagai bagian dari korupsi. Tindakan korupsi didefinisiakan lebih luas di UNCAC 2003 yang menyangkut sektor publik, sektor swasta, pekerja dan organisasi asing yang beroperasi di suatu negara serta pencucian uang hasil korupsi.

Definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok (*Word Bank* dan IMF). Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi bila memenuhi unsur-unsur. Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur terakhir adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Suatu perbuatan

dikatakan korupsi diantaranya adalah bila memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Titik ujung dari korupsi adalah kleptokrasi (pemerintahan oleh para pencuri).

Pembelajaran korupsi dikelompokkan dalam teori yang mencoba untuk menjelaskan penyebab endemik korupsi di negara berkembang menjadi tiga golongan : analisis mainstream ekonomi dari korupsi, patrimonialisme dan korupsi, dan teori negara kleptokratis. Pendekatan ini dijelaskan secara terpisah.

#### A. Analisis Mainstream Ekonomi dari Korupsi

Sebagian besar ekonom yang telah mempelajari korupsi secara ekstensif telah menemukan bahwa korupsi lebih mungkin terjadi di negara-negara yang memiliki beberapa fitur berikut :

1. Negara memainkan peran yang dominan dimana sektor publik memainkan peran utama dalam perekonomian dan sektor swasta memainkan peran minimal atau sedikit di dalam perekonomian.
2. Negara memproduksi banyak barang yang dikonsumsi oleh publik dan adanya sedikit persaingan terhadap sektor swasta.
3. Banyaknya peraturan yang mengatur perekonomian negara
4. Para pejabat publik memiliki banyak kebijakan dalam melaksanakan peraturan.
5. Tidak ada sistem akuntabilitas dan transparansi yang mencegah transaksi korupsi, tidak adanya aturan bagaimana pasar bekerja dengan baik (Kruger, 1974; Lambsdorff, 1999: 2-4; Mauro, 1997: 85; Tanzi, 1998).

Penelitian empiris mengkonfirmasi asumsi ini dan menemukan bahwa semakin tinggi ukuran relatif anggaran keseluruhan pemerintah terhadap GDP, lebih tinggi tingkat korupsi dalam negara ini (LaPolombara, 1994: 338). Disamping itu, lebih kompetitif dan terbuka disuatu negara, semakin kecil kemungkinan korupsi yang menjadi endemik di dalamnya (Ades & Di Tella 1995). Dengan demikian, studi ini menegaskan korupsi sangat berkorelasi tingkat tinggi di dalam intervensi pemerintah di suatu perekonomian.

Dari perspektif pejabat korup, karena mereka menempati posisi yang relatif penting dalam pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, tetapi menerima sedikit kompensasi dalam melaksanakan tugasnya, mereka percaya bahwa mereka layak untuk menerima tambahan penerimaan dalam melakukan pelayanan mereka terhadap publik. Oleh karena itu mereka terlibat dalam perilaku “*rent-seeking*” yang akan meningkatkan kesejahteraan diri mereka sendiri dan klien mereka, tetapi belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Klitgaard, 1988; Krueger, 1974). Selain itu, ketika hukuman yang terlibat dalam perilaku korupsi lemah, atau bahkan lebih buruk, ketika supervisor mereka mendorong perilaku tersebut, pejabat publik lebih mungkin terlibat dalam perilaku korup (Klitgaard, 1988).

#### B. Patrimonialisme dan Korupsi

Pemikiran Weber ada tiga jenis otoritas: otoritas tradisional, dimana otoritas berdasarkan pada klaim turun-menurun berdasarkan tradisi dan penguasa cenderung memiliki kekuasaan absolut, otoritas kharismatik, dimana otoritas didasarkan pada kharisma pemimpin dan kemampuannya untuk menyajikan publik dalam mengikuti perintahnya, dan otoritas rasional atau hukum, dimana pemimpin memperoleh otoritas secara hukum dan profesional secara menyeluruh bukan berasal dari warisan, tradisi, atau kekuatan kharismatik (Weber, 1947). Pemikiran Weber bahwa negara yang berdasarkan otoritas tradisional, petugas di birokrasi tidak direkrut menggunakan persyaratan jasa atau profesional, tetapi malah direkrut berdasarkan keluarga atau hubungan klan atau loyalitas pribadi pada penguasa. Untuk mendukung petugas, penguasa bisa membayar gaji mereka atau dapat memungkinkan mereka untuk memiliki “hak istimewa” dimana mereka bisa mengumpulkan pendapatan dari publik. Mereka bisa bermain dengan kekuatan untuk reward atau untuk mempertahankan loyalitas kepadanya. Dimana sistem ini disebut patrimonialisme (Weber: 342-347, 351-352).

#### C. Teori Negara Kleptokrasi

Teori negara kleptokratis berdasarkan pada teori mainstream ekonomi, tetapi membawa analisis lebih lanjut dengan asumsi bahwa teori mainstream ekonomi tidak membawa keberlanjutan. Menyatakan bahwa endemik korupsi

berada di rezim yang diperintah oleh kepala negara tunggal yang tujuan atau keuntungan di kantor untuk memaksimalkan pendapatan mereka sendiri. Kleptocrat didefinisikan sebagai tujuan utama untuk memperkaya diri, memiliki kekuatan untuk memajukan tujuan sambil memegang jabatan publik (Andreski 1968).

Sistem politik dibuat untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi elit pemerintah yang bertindak seperti monopoli swasta, berusaha untuk efisiensi produktif, tetapi juga membatasi output dari monopoli untuk memaksimalkan keuntungan mereka (Olson, 1993). Hukum dan peraturan lainnya (seperti pajak, subsidi, bahkan privasi) yang dibuat bukan karena kebutuhan mereka, tetapi memaksimalkan benefit elit (Rose-Ackerman, 1999: 117). Perilaku kleptocrat diikuti oleh bawahan dari atas ke bawah, menyebabkan masalah korupsi buruk dan berjangka panjang, bisa membantu untuk meruntuhkan perekonomian. Dalam kasus Indonesia rezim Suharto dalam jangka panjang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi negara, akhirnya meruntuhkan perekonomian negara setelah korupsi yang menjadi sangat lazim di seluruh negara. (Krueger, 1974), juga berpendapat bahwa kebijakan untuk mengurangi kegiatan perekonomian negara dan membuat lebih kompetitif dan terbuka juga dapat mengakibatkan perilaku *reent-seeking*.

### 2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Eksogen

Pertumbuhan eksogen adalah kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi muncul karena pengaruh dari luar ekonomi atau perusahaan yang diamati. Pertumbuhan eksogen mengasumsikan bahwa kemakmuran ekonomi terutama ditentukan oleh faktor eksternal dari pada faktor internal. Menurut keyakinan ini, mengingat jumlah tenaga kerja dan teknologi statis yang dianggap tetap, pertumbuhan ekonomi akan berhenti di beberapa titik, karena produksi yang berkelanjutan mencapai keadaan keseimbangan berdasarkan faktor permintaan internal.

Konsep pertumbuhan eksogen tumbuh dari model pertumbuhan neoklasik dan karya-karya yang dikontribusikan oleh Robert Solow. Faktor model pertumbuhan eksogen dalam produksi, mengurangi pengembalian variabel modal

dan teknologi untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan eksogen adalah sejenis teori atau keyakinan bahwa pertumbuhan yang terjadi dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar ekonomi. Konsep umum yang sama dapat diterapkan pada perusahaan perorangan, dengan pengertian bahwa faktor-faktor diluar kendali langsung perusahaan tersebut memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh perusahaan tersebut. gagasan umum pertumbuhan eksogen dikembangkan pada pertengahan abad ke-20, dan mempertimbangkan dasar-dasar teori pertumbuhan neoklasik sambil memperluas konsep untuk memungkinkan kejadian dan skenario yang relevan dengan pertumbuhan didalam lingkungan kontemporer.

Konsep umum pertumbuhan eksogen dikontraskan dengan teori ekonomi lainnya yang dikenal sebagai teori pertumbuhan endogen. Sementara yang pertama berfokus pada gagasan bahwa faktor eksternal mempengaruhi tingkat pertumbuhan dalam ekonomi, yang terakhir memegang pemahaman bahwa itu adalah faktor internal yang terutama mempengaruhi jenis pertumbuhan yang dialami dalam suatu perekonomian. Kedua teori tersebut memungkinkan potensi pertumbuhan ekonomi yang tidak ekonomis, yang berarti bahwa ekonomi mungkin mengalami dimana tidak ada pertumbuhan positif yang benar-benar terjadi.

Sejumlah faktor dianggap sebagai bagian dari teori pertumbuhan eksogen. Perhatian diberikan pada semua jenis faktor produksi, termasuk tenaga kerja dan pergeseran atau inovasi teknologi yang mungkin terjadi, pengamanan bahan baku yang digunakan dalam produksi, dan bahkan penawaran dan permintaan yang dihasilkan untuk barang yang dihasilkan. Bahkan faktor-faktor seperti insentif pemerintah dalam bentuk pemotongan pajak akan diperhitungkan, dan juga tindakan pemerintah yang mungkin berdampak buruk pada proses produksinya sendiri.

Beberapa faktor dipandang memiliki dampak jangka pendek terhadap pertumbuhan eksogen, seperti insentif pajak sementara yang hanya berlaku sekitar satu tahun. Faktor lain, seperti perubahan teknologi, dapat dianggap sebagai faktor eksternal yang memiliki dampak jangka panjang terhadap jumlah pertumbuhan

ekonomi yang dialami dalam suatu bangsa atau bahkan didalam industri atau perorangan. Faktor lain, seperti perubahan teknologi dapat dianggap sebagai faktor eksternal yang memiliki dampak jangka panjang terhadap jumlah pertumbuhan ekonomi yang dialami dalam suatu bangsa atau bahkan didalam industri atau perorangan. Tingkat dimana gagasan pertumbuhan eksogen dapat diterapkan pada situasi ekonomi tertentu adalah masalah yang masih diperdebatkan oleh para pendukung teori ekonomi yang berbeda, terutama mereka yang melihat faktor eksternal memiliki dampak pada perekonomian namun tidak berfungsi sebagai dampak utama, dalam mempengaruhi arah perekonomian.

### 2.1.3 Teori Ketidakpastian Keynes

Menurut Keynes investasi mempunyai peranan penting yaitu sebagai determinan *employment* dan pendapatan. Kesempatan kerja bagi masyarakat sangat bergantung pada investasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan investasi sebagai suatu determinan penting untuk *employment* dan pendapatan adalah berdasarkan dugaan-dugaan, perkiraan-perkiraan, atau ramalan-ramalan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi, hampir tidak memiliki kepercayaan atas kepercayaan diri sendiri. Hanya mengikuti perkembangan dan pendapat dari pengusaha yang merefleksikan pasar. Apabila kepercayaan positif tentang masa depan, maka investasi meningkat. Sebaliknya, apabila kepercayaan pesimis tentang masa depan, maka investasi akan berkurang.

Dalam pandangan Keynes, individu selalu dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang tinggi, hal ini nantinya akan berpengaruh pada tingkat kemakmuran disuatu negara (Hoppe, 2007: 2004). Keynes berpandangan bahwa peran pemerintah penting dalam pelaksanaan investasi, khususnya pada sektor infrastruktur yang mendukung berlangsungnya suatu kegiatan dalam investasi. Keynes dalam memandang pasar ialah ketidakpastian regulasi pasar oleh negara akan mengarah pada terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya produktif masyarakat tertentu. Karena itu, menurut Keynes negara perlu hadir dalam aktivitas ekonomi pada situasi tertentu. Dengan kata lain, pasar tidak dibiarkan berjalan sendiri tanpa peran negara (Yustika, 2007:31).

Negara atau pemerintah dalam pandangan Keynes dianggap perlu dalam membawa perekonomian ke arah yang ditentukan. Hal ini turut dipengaruhi oleh kestabilan ekonomi dalam suatu negara dan kebiasaan masyarakat yang menghambat mekanisme pasar yang menyebabkan ketidakpastian (Brown, 1995:58-61). Semua inovasi teoritis yang disajikan dalam *The General Theory* berhubungan dengan asumsi perilaku ekonomi dalam pasar. Point penting dari pendapat Keynes yaitu mengakui pentingnya pembentukan harapan dibawah ketidakpastian yang tidak terukur. Menjelaskan berubahnya perilaku ekonomi dalam situasi ketidakpastian.

#### 2.1.4 Teori Resiko Politik

Resiko politik merupakan resiko yang dihadapi oleh perusahaan multinasional berkaitan dengan aspek politik oleh suatu pemerintahan yang secara signifikan akan mempengaruhi investasi yang telah ditanamkan (Fahmi, 2009:94). Kondisi politik dan regulasi yang mengakomodasi investasi akan memberikan iklim bisnis yang lebih baik sehingga menarik investasi asing untuk berinvestasi di negaranya. Hal ini menjadi penting karena ketika perusahaan sudah berinvestasi dalam suatu negara maka segala perubahan yang terjadi dalam negara tersebut terutama yang berkaitan langsung dengan lingkungan bisnis akan mempengaruhi keuntungan operasi dan nilai aset yang telah ditanamkan (Petrovic, 2009:20).

Secara keseluruhan resiko politik dapat dibagi menjadi dua kategori utama (Desebordes dan Vicard, 2007). Pertama adalah resiko sistemik yang berkaitan dengan kerangka intitusional domestik sehingga tingkat resiko yang dihadapi oleh semua investor bersifat setara. Kedua adalah resiko non-sistemik yang berarti hanya akan membawa dampak pada perusahaan tertentu saja. Resiko non-sistemik atau yang disebut oleh Rudolph Desbordes sebagai resiko ideosinkratrik, erat kaitannya dengan faktor hubungan politik antara *home* dan *host coutry* dari perusahaan multinasional (Desebordes dan Vicard, 2007:5).

Pada praktiknya resiko politik ini memiliki indikator yang bervariasi tergantung dari organisasi yang melakukan, namun berdasarkan definisi Hisrich maka setidaknya ada dua unsur krusial yang membentuk resiko politik dalam

negara yaitu stabilitas pemerintahan serta regulasi. Menurut Mathias Bussed dan Carsten Hefeker (2005) setidaknya ada dua hal terpenting dieksplorasi dalam menjelaskan stabilitas politik dalam suatu negara. Pertama, stabilitas pemerintahan yang mencerminkan kemampuan pemerintah untuk tetap berada dalam posisinya dalam jangka waktu yang ditentukan serta memberikan pengaruhnya dalam kebijakan yang dihasilkan. Stabilitas pemerintahan suatu negara bisa dilihat melalui pergantian pemimpin yang dilakukan sebelum masa jabatan berakhir baik karena mengundurkan diri kudeta, atau *impeachment*. Kedua merupakan akuntabilitas demokratis pemerintah yang secara sederhana dapat dipahami sebagai pemenuhan kebebasan sipil dan hak politik. Kedua indikator tersebut dapat dijadikan patokan stabilitas politik.

Sedangkan dalam hal regulasi, maka menurut Evica Petrovic (2009) resiko politik bagi investasi asing dapat dieksplorasi melalui kebijakan yang terintegrasi ke dalam sistem ekonomi pasar yang lebih lanjut dapat dijelaskan melalui tiga hal. Pertama, adanya liberalisasi baik dalam perdagangan maupun dalam penentuan harga suatu komoditas. Kedua, upaya reformasi perusahaan domestik. Terakhir adalah adanya pengembangan institusi maupun kerangka kerja legal lainnya yang dapat mendukung implementasi ekonomi pasar yang tentu cukup mengakomodasi penanaman dan pengembangan investasi asing sehingga tingkat *uncertainty* menjadi lebih rendah. *Uncertainty* yang dimaksud disini adalah perubahan dalam lingkungan bisnis yang berpengaruh pada nilai investasi dari perusahaan.

#### 2.1.5 Teori Investasi

Pengeluaran untuk barang konsumsi bertujuan untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga saat ini, sedangkan pengeluaran untuk barang investasi bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dimasa yang akan datang. Definisi investasi adalah komponen GDP yang berkaitan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Belanja investasi memainkan peran penting tidak hanya pada pertumbuhan jangka panjang namun juga pada siklus bisnis jangka pendek karena investasi merupakan bagian dari GDP yang paling sering berubah. Berdasarkan pada fungsi investasi sederhana yang mengaitkan investasi dengan tingkat suku bunga riil :



$$I = I(r)$$

Fungsi tersebut menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga riil menurunkan investasi. (Mankiw, 2007:61)

Menurut asalnya jenis dana investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu FDI merupakan jenis modal yang sumber modalnya dari luar negeri, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Salvator (1997) menjelaskan FDI terdiri atas investasi portofolio (*Portofolio Investment*) adalah investasi yang melibatkan aset finansial saja seperti obligasi dan saham dan FDI yang meliputi aset nyata.

Konsep *Foreign Direct Investment* (FDI) sebenarnya masih belum ada acuan yang baku, namun demikian studi literatur maupun kajian empiris yang pernah dilakukan dapat dipakai sebagai rujukan konsep tersebut yang dimaksud dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah arus modal internasional dimana perusahaan disuatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya dinegara lain. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan diluar negeri (Sarwedi, 2002).

Investasi Asing Langsung (FDI) didefinisikan sebagai investasi jangka panjang yang dilakukan secara langsung oleh investor asing di dalam suatu bidang usaha warga negara domestik. Investasi dalam bentuk FDI merupakan investasi yang relatif stabil dalam jangka panjang. Hal ini membantu dalam pemulihan perekonomian yang membutuhkan banyak dana dan penyerapan tenaga kerja yang cukup luas. Selain itu, masuknya FDI menunjukkan kepercayaan investor asing untuk melakukan kegiatan ekonominya di negara tuan rumah sehingga mendorong *capital inflow* ( arus modal masuk).

FDI yang dilakukan oleh negara-negara di dunia pada hakekatnya berawal dari pemikiran sebagai berikut (Rashmi, 2003):

1. Ketidaksempurnaan pasar (Hymer 1976) yang mengemukakan bahwa FDI merupakan efek langsung dari pasar yang tidak sempurna
2. Teori internalisasi (Rugman 1986), dimana FDI digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengambil keuntungan dari efisiensi internal *host country*.

3. Pendekatan eklektik (Dunning 1988) dimana FDI digunakan untuk mengambil keuntungan *ownership*, *internalisation*, dan *locational advantages*.

Terdapat beberapa alasan mengapa investor menanamkan modalnya di luar negeri, selain untuk mencari pasar dan ekspektasi keuntungan yang lebih besar. Beberapa jenis FDI adalah sebagai berikut :

1. FDI vertikal

FDI yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah, kemudian hasil produksi di negara tersebut disalurkan kembali ke negara induk. Misalnya dalam suatu produk yang proses produksinya *capital-intensive* akan memindahkan proses produksinya ke negara-negara yang kaya akan modal.

2. FDI horizontal

FDI yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. FDI jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungan dari FDI dengan jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen.

FDI juga dapat dibedakan menjadi *greenfield* dan akuisisi. Investasi dengan jenis *greenfield* akan membangun unit produksi yang baru sementara FDI dengan tipe akuisisi akan membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, FDI juga dapat dibedakan berdasarkan motivasi yang melatarbelakangi investor asing, yaitu:

1. *Resource seeking*: Investasi dilakukan untuk mencari faktor-faktor produksi yang lebih efisien di negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal.
2. *Market seeking*: Investasi yang dilakukan dengan tujuan mencari pasar yang baru atau mempertahankan pasar yang lama. Strategi ini dapat juga

dilakukan sebagai strategi pertahanan. Investasi dengan latar belakang untuk mencari pasar direalisasikan di dalam bentuk merger dan akuisisi.

3. *Efficiency seeking*: investasi dimana perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari *economic scale* dan *scope*. Tipe FDI ini banyak digunakan di negara-negara berkembang.

Pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI dibanding modal lainnya di suatu negara dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (*pull factor*) yang dapat terdiri dari kondisi pasar, sumber daya, daya saing, kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan FDI itu sendiri. Selain itu juga kondisi dan strategi dari penanaman modal asing (*push factors*) yang berinvestasi.

Minat investor asing untuk menanamkan dana dalam bentuk FDI menurut (Dunning, 1981) dapat didasarkan oleh karakteristik utama yaitu *ownership*, *location* dan *internalization advantages*. Pada dasarnya *ownership advantages* adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang menjadikan perusahaan tersebut maju atau menonjol pada sektor-sektor tertentu. Keunggulan tersebut yang dimiliki secara internal oleh perusahaan tersebut, dapat dimanfaatkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, biasanya disebut *firm specific asset* yang terdiri dari *tangible assets* seperti barang modal dan mesin, serta *intangible assets* seperti *knowledge*, *organizational* dan *entrepreneurial skill*, *access to market*, teknologi. Sedangkan *location advantage* merupakan keunggulan yang dimiliki di daerah tersebut dan hanya dapat digunakan di daerah tersebut. Namun keunggulan tersebut terbuka untuk semua perusahaan, seperti tenaga kerja yang murah, sumber-sumber alam yang murah, iklim yang menunjang. Sementara *internalization advantages* adalah tindakan untuk menghindari adanya *disadvantages* ataupun kapitalisasi sumber-sumber daya alam yang disebabkan sistem harga di pasar dan sistem kebijakan pemerintah.

Internalisasi aktivitas terhadap sistem harga diberlakukan bila terjadi ketidaksempurnaan pasar yang disebabkan karena adanya hambatan untuk berkompetisi atau tingginya biaya transaksi, sehingga aktivitas ekonomi tidak

berjalan dengan efisien. Selain itu juga karena tidak tersedianya informasi mengenai barang dan jasa yang akan dipasarkan, atau bila informasi itu memiliki biaya. Sementara itu internalisasi aktivitas terhadap kebijakan pemerintah dilakukan bila terjadi ketimpangan dalam alokasi sumber-sumber daya alam. Intervensi pemerintah sering dilakukan untuk melindungi suatu produk yang menggunakan sumber alam tertentu.

Sektor publik berperan penting dalam menciptakan dan memperkuat benefit lokasi dengan menyediakan barang atau jasa, mendidik keterampilan tenaga kerja, menyediakan infrastruktur serta menjalankan kebijakan. Sebaliknya sektor publik yang tidak efisien akan cenderung men-*discourage* investor. Terkait dengan kebijakan publik, perusahaan asing tidak hanya semata mencari kebijakan yang *business-friendly*. Investasi FDI merupakan exposure jangka panjang perusahaan asing terhadap kondisi ekonomi dan politik dari *host country*, karenanya investor mementingkan komitmen pemerintah sehingga mereka yakin bahwa investasi yang mereka tanamkan aman dan *expropriation*, profit dapat ditransfer ke luar negeri, *potential dispute* antara pemerintah *host country* dan perusahaan multinasional dapat diselesaikan dengan cara yang *fair* dan efisien. Dalam kaitan ini negara yang ekonomi, politik dan sosialnya stabil, memiliki kebijakan perdagangan bebas, serta kedekatan geografis dengan perekonomian yang besar dan sedang bertumbuh akan lebih menarik bagi investor asing.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Berbagai penelitian telah meneliti mengenai hubungan antara korupsi dengan perekonomian diberbagai negara. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara korupsi dan pembangunan ekonomi, korupsi dan pertumbuhan ekonomi, korupsi dan kemiskinan. Obyek penelitian berhubungan dengan hubungan kausal antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi berbasis data *time series* di tiga negara ASEAN yang diteliti. Terdapat hasil penelitian yang berbeda di setiap penelitian yang dilakukan diberbagai negara. Dikarenakan bahwa setiap penelitian memiliki fenomena dan pengambilan waktu yang berbeda serta terdapat kekurangan dan kelebihan dari metode dan alat analisis yang digunakan. Secara umum, hasil studi menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat korupsi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian J. Vernon Henderson dan Ari Kuncoro (2006) tentang *Corruption in Indonesia* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, dengan hasil memperkirakan hubungan antara suap, waktu yang dihabiskan oleh pejabat, dalam bentuk regulasi. Terdapat korelasi positif antara suap dan *red tape*. Suap merupakan waktu kegiatan intensif. Pengaruh lisensi pada suap dan memberi perkiraan tidak langsung pada reformasi fiskal pada suap dan waktu yang terbuang melalui efek birokrasi.

Joko Waluyo (2010) tentang Analisis Hubungan Kausalitas antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan : Suatu Studi Lintas Negara. Menggunakan alat analisis panel data dan *Seemingly Unrelated Regression (SUR)*. Menunjukkan bahwa, kemiskinan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, korupsi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap korupsi, kemiskinan tidak berdampak pada korupsi, dan korupsi tidak berdampak terhadap kemiskinan, kombinasi kemiskinan dan korupsi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kombinasi kemiskinan dan pertumbuhan berdampak terhadap korupsi.

Virginie Vial dan Hulien Hanoteau (2010) tentang *Corruption, Manufacturing Plant Growth, and the Asian Paradox: Indonesian Evidence*. Menggunakan alat analisis *Ordinary Least Square (OLS)* dengan menunjukkan

hasil terdapat hubungan positif antara korupsi terhadap perencanaan *output* dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, perencanaan yang menyajikan tingginya nilai suap menambah rasio yang signifikan dan lebih tinggi output dan pertumbuhan produktivitas.

Chiung – Ju Huang (2013) tentang *Corruption and Income Inequality Inap ASIAN Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Test*. Menggunakan alat analisis Tes Kausalitas Panel *Bootstrap Granger*, menunjukkan bahwa ada hubungan kausalitas searah dari korupsi terhadap ketidaksetaraan pendapatan di China dan di Filipina. Sementara itu, hubungan kausalitas satu arah dari ketidaksetaraan pendapatan terhadap korupsi di Indonesia, Jepang, Korea, dan Thailand.

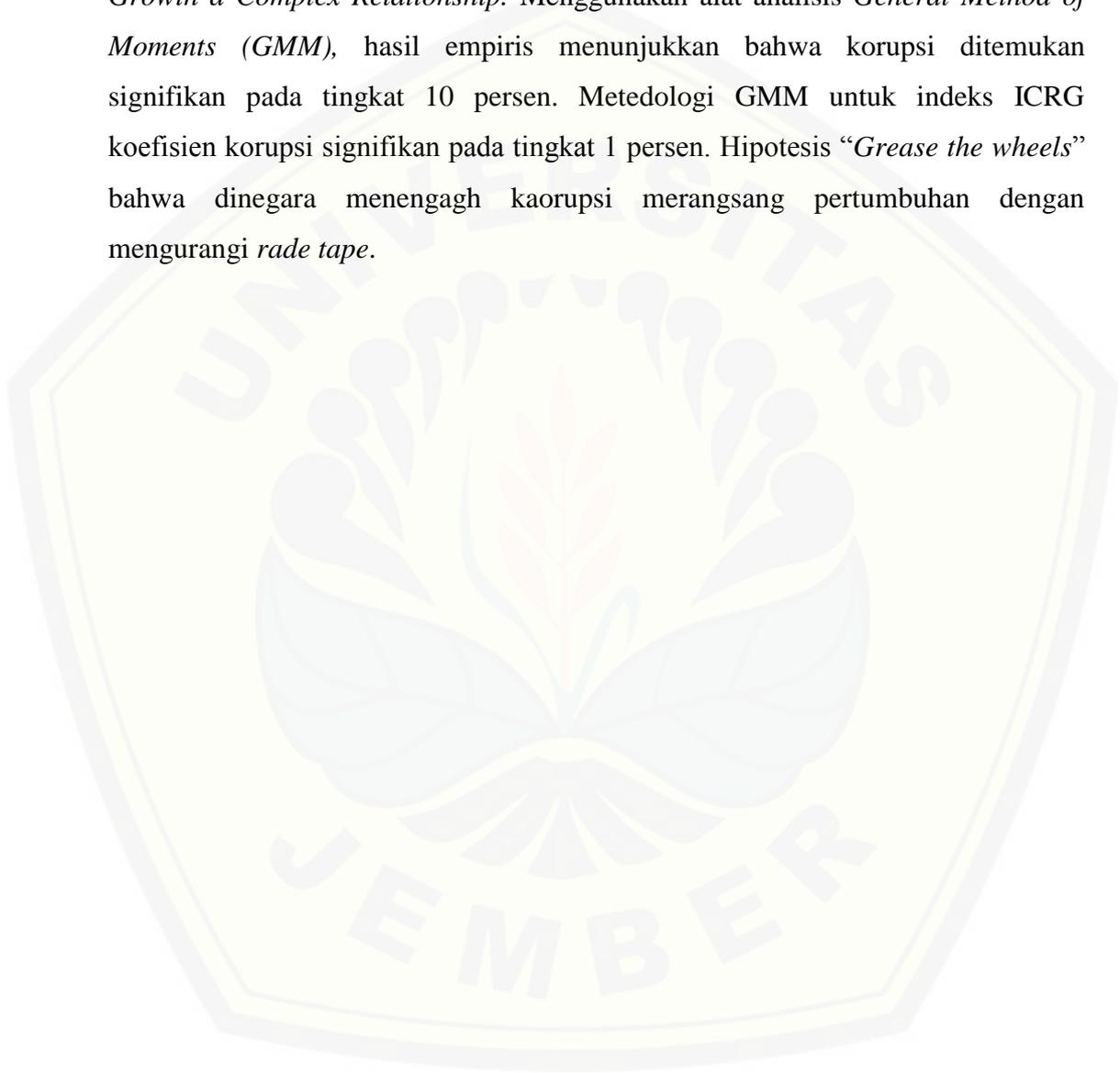
Chiung – Ju Huang tentang (2015) tentang *Is Corruption bad for economic growth? Evidence from Asia-Pasifik Countries* Menggunakan alat analisis Tes Kausalitas Panel *Bootstrap Granger*, menurut hasil empiris menunjukkan bahwa tidak mendukung persepsi umum bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ketiga belas negara di Asia Pasifik. Disisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis “*grease the wheels*” didukung untuk Korea Selatan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sebagian besar negara Asia-Pasifik, penggunaan para pembuat kebijakan anti korupsi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi suatu negara yang mungkin tidak efektif.

Maria Violeta Cimpoeru dan Valentin Cimpoeru (2015) tentang *Budgetary Transparency – an Improving factor for Corruption Control and economic Performance*. Menggunakan alat analisis *Regresi Berganda data panel*, menunjukkan bahwa hubungan statistik antara variabel endogen dan eksogen cukup kuat, varian dari indikator CC dijelaskan oleh dua variabel independen (indeks transparansi anggaran dan *GDP per kapita*) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan selama indikator kontrol korupsinya.

Giorgio D’Agostino, J. Paul Dunne and Luca Pieroni (2016) tentang *Government Spending, Corruption and Economic Growth*. Menggunakan alat analisis *General Method of Moments (GMM)*, menunjukkan hasil penelitian bahwa korupsi membuat efek negatif dari beban militer terhadap pertumbuhan.

Pemberantasan korupsi cenderung baik secara langsung meningkatkan kinerja ekonomi agregat, memiliki efek tidak langsung mengurangi dampak negatif beban militer.

Girijasankar Mallik dan Shrabani Saha (2016) tentang *Corruption and Growth a Complex Relationship*. Menggunakan alat analisis *General Method of Moments (GMM)*, hasil empiris menunjukkan bahwa korupsi ditemukan signifikan pada tingkat 10 persen. Metodologi GMM untuk indeks ICRG koefisien korupsi signifikan pada tingkat 1 persen. Hipotesis “*Grease the wheels*” bahwa dinegara menengah korupsi merangsang pertumbuhan dengan mengurangi *rade tape*.



Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	Kuncoro dan Henderson (2006)	<i>Corruption In Indonesia</i>	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Biaya Suap, Red Tape, Perusahaan, FDI, Status Kepemilikan Pemerintah.	Memperkirakan hubungan antara suap, waktu yang dihabiskan oleh pejabat, dalam bentuk regulasi. Terdapat korelasi positif antara suap dan red tape. Suap merupakan waktu kegiatan intensif. Pengaruh lisensi pada suap dan memberi perkiraan tidak langsung pada reformasi fiscal pada suap dan waktu yang terbuang melalui efek birokrasi.
2	Waluyo (2010)	<i>Analisis Hubungan kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara</i>	<i>Seemingly unrelated regression (SUR)</i>	COR, POV, GDP	Kemiskinan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, korupsi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap korupsi, kemiskinan tidak berdampak pada korupsi, dan korupsi tidak berdampak terhadap kemiskinan, kombinasi kemiskinan dan korupsi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kombinasi kemiskinan dan pertumbuhan berdampak terhadap korupsi.
3	Vial dan	<i>Corruption</i>	<i>Ordinary Least</i>	Korupsi, perpajakan,	Terdapat hubungan positif antara korupsi terhadap perencanaan output



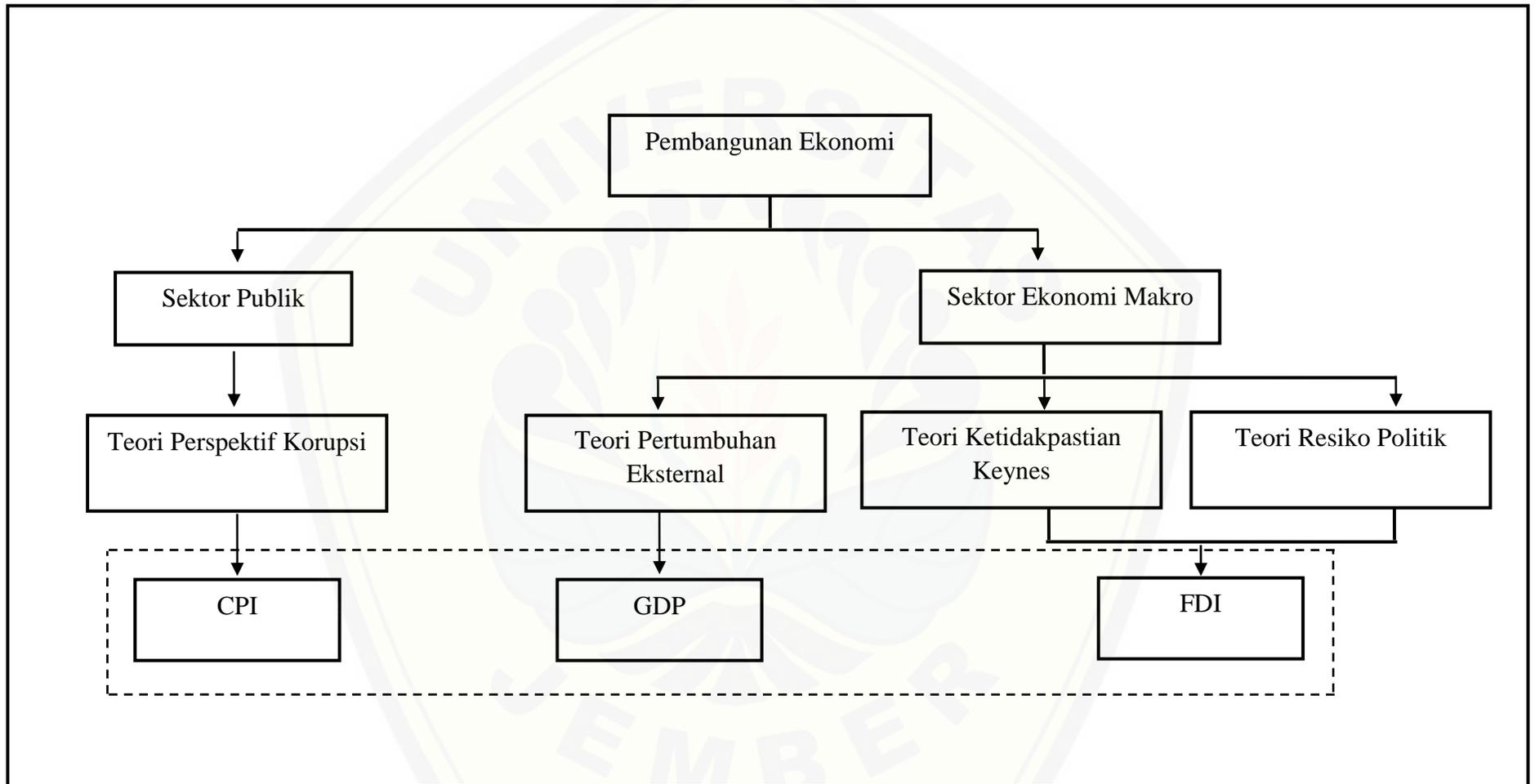
	Hanoteau (2010)	<i>Manufacturing Plant growth, and the Asian Paradox : Indonesian evidence</i>	<i>Square (OLS)</i>	pertumbuhan dan produktifitas.	dan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, perencanaan yang menyajikan tingginya nilai suap menambah rasio yang signifikan dan lebih tinggi output dan pertumbuhan produktivitas.
4	Huang (2013)	<i>Corruption and Income Inequality In ASEAN Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Test</i>	Tes Kausalitas Panel Bootstrap Granger	Korupsi dan Tingkat Pendapatan	Secara empiris, hasilnya menunjukkan bahwa ada satu arah kausalitas Granger dari korupsi sehingga ketidaksetaraan pendapatan untuk Cina dan Filipina. Dan hubungan satu arah kausalitas Granger dari ketidaksetaraan pendapatan terhadap korupsi untuk Indonesia, Jepang, Korea, dan Thailand.
5	Huang (2015)	<i>Is Corruption bad for economic growth? Evidence from Asia-Pasifik Countries</i>	Tes Kausalitas Panel Bootstrap Granger	Pertumbuhan ekonomi, kebebasan ekonomi, CPI	Hasil empiris menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan untuk ketigabelas negara Asia-Pasifik, kecuali korea Selatan. Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan positif.
6	Cimpoeru (2015)	<i>Budgetary Transparency-an Improving Factor for Corruption Control and economic</i>	<i>Regresi Berganda data panel</i>	<i>CC, GDP per kapita, OBI</i>	Hubungan statistic antara variabel endogen dan eksogen cukup kuat, varian dari indikator CC dijelaskan oleh dua variabel independen (indeks transparansi anggaran dan <i>GDP per kapita</i> ) yang memiliki pengaruh

		<i>Performance</i>			positif dan signifikan selama indicator control korupsinya.
7	D'Agostino, <i>et al</i> (2016)	<i>Government Spending, Corruption and Economic Growth</i>	<i>General Method of Moments (GMM)</i>	<i>Government spending, GDP dan Corruption.</i>	Korupsi membuat efek negatif dari beban militer terhadap pertumbuhan. Pemberantasan korupsi cenderung baik secara langsung meningkatkan kinerja ekonomi agregat, memiliki efek tidak langsung mengurangi dampak negatif beban militer
8	Mallik dan Saha (2016)	<i>Corruption and Growth a Complex Relationship</i>	<i>General Method of Moments (GMM)</i>	GDP, Korupsi, Tingkat Pendidikan, Populasi.	Hasil empiris menunjukkan bahwa korupsi ditemukan signifikan pada tingkat 10 persen. Metodologi GMM untuk indeks ICRG koefisien korupsi signifikan pada tingkat 1 persen. Hipotesis " <i>Grease the wheels</i> " bahwa dinegara menengah korupsi merangsang pertumbuhan dengan mengurangi <i>rade tape</i> .

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir atau arah dari penelitian ini. Kerangka konseptual menunjukkan konstruksi ekonomi dalam penelitian serta mempunyai hubungan yang sebangun terhadap tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas korupsi terhadap indikator makroekonomi di tiga negara ASEAN. Indikator makroekonomi yang digunakan yaitu GDP dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Penelitian ini menggunakan pendekatan model analisis kausalitas Granger yang dihubungkan dengan fenomena korupsi dan perekonomian di tiga negara ASEAN.

Penelitian ini ingin mengetahui dinamika korupsi dan perekonomian di ASEAN 3. Arah pemikiran dalam penelitian ini yaitu pada model analisis kausalitas Granger untuk mendeteksi arah hubungan timbal-balik antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Kerangka konseptual secara ringkas digambarkan pada Gambar. 2.1



Ruang Lingkup Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Ringkasan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Korupsi memiliki hubungan kausalitas dengan PDB.
2. Korupsi memiliki hubungan kausalitas dengan *Foreign Direct Investment* (FDI).

#### 2.5 Asumsi Penelitian

Ringkasan asumsi penelitian yang digunakan adalah :

1. *Corruption Perception Index* (CPI) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi di masing-masing negara ASEAN 3. Asumsi ini didasarkan atas konsep bahwa *Corruption Perception Index* adalah proxy indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh *Tranparancy International*.
2. Pertumbuhan ekonomi menggunakan tingkat GDP perkapita dalam penelitian di masing-masing negara ASEAN 3. Asumsi ini didasarkan atas konsep bahwa tingkat GDP perkapita adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan disuatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu.
3. *Foreign Direct Investment* (FDI) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Foreign Direct Investment* (FDI) dimasing-masing negara ASEAN 3. Asumsi ini didasarkan bahwa tingkat modal asing yang masuk disuatu negara dipengaruhi oleh faktor internal disuatu negara tersebut.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab 3 merupakan penjelasan dari jenis dan sumber data yang diperoleh, desain penelitian, spesifikasi model penelitian, metode analisis data yang akan digunakan untuk mengestimasi model serta definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

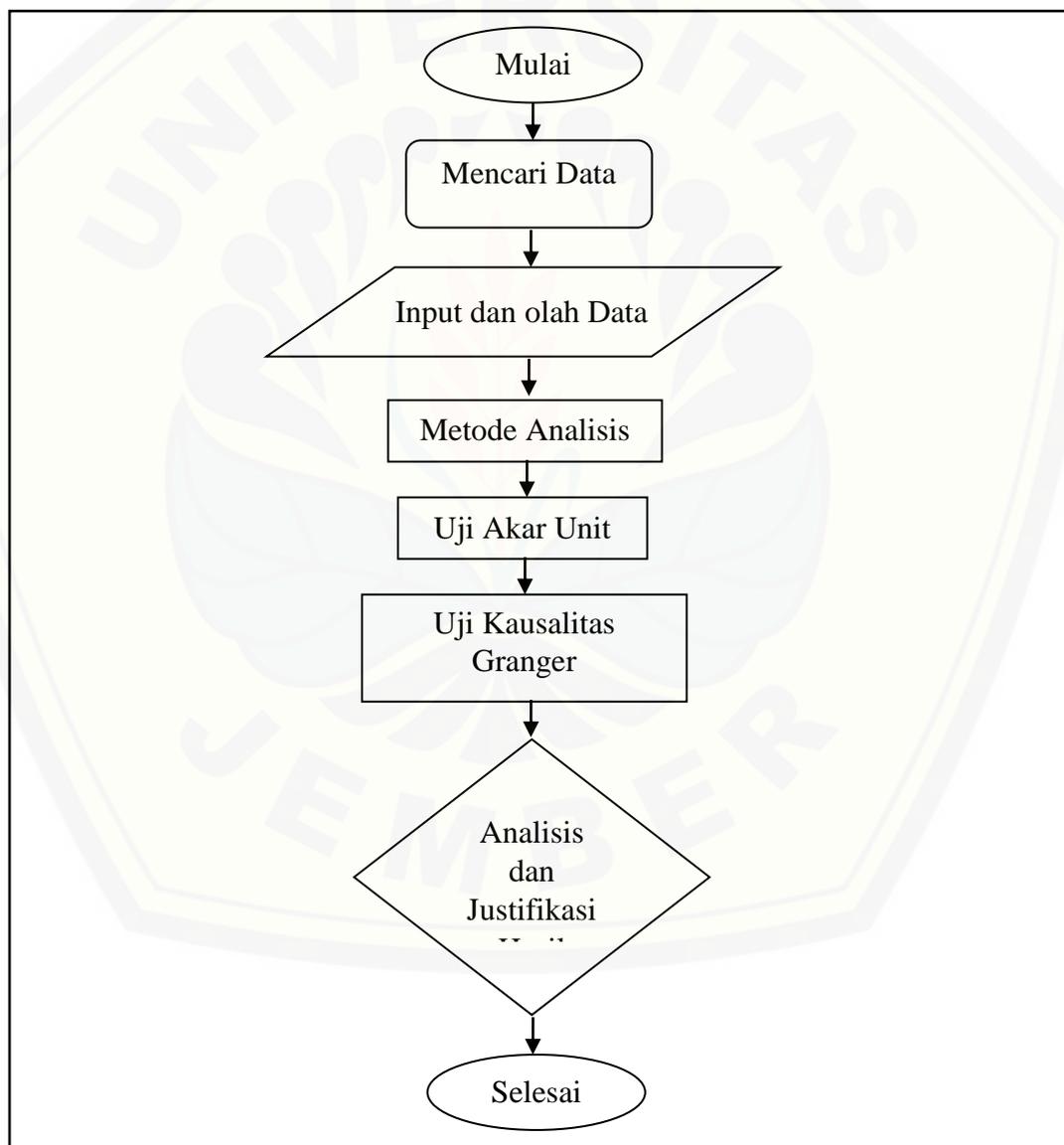
#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa runtut waktu (*time series*) dengan periode tahunan yang dimulai pada tahun 2000 hingga 2016 dengan objek penelitian di tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Obyek penelitian yang hanya mencakup tiga negara berdasar pertimbangan bahwa tiga negara tersebut memiliki karakteristik indeks persepsi korupsi yang tidak terlalu berbeda. Adapun alasan untuk penelitian ini yaitu untuk menyelidiki hubungan kausal antara korupsi, *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dialami di tiga negara ASEAN. Negara yang dipilih dalam penelitian ini adalah negara yang tergabung dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Didirikan pada tahun 1967, ASEAN bertujuan untuk memperkuat integrasi regional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data tahunan dari korupsi yang diukur berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI), pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan *Gross Domestic Product* (GDP), dan *Foreign Direct Investment* (FDI). *Corruption Perception Index* (CPI) diterbitkan setiap tahun oleh *Transparency International* sejak tahun 1995, telah banyak digunakan untuk mengangkat isu korupsi terhadap agenda kebijakan internasional. Dengan demikian, *Corruption Perception Index* (CPI) adalah *proxy* untuk tingkat korupsi dalam penelitian ini, dimana negara-negara dengan skala *Corruption Perception Index* (CPI) yang lebih tinggi dianggap memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah.

### 3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan dalam melakukan penelitian agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik, sistematis dan efisien. Dalam desain penelitian menjelaskan proses yang digambarkan dalam bagan-bagan penelitian dan menguraikan jawaban rumusan masalah dalam penelitian. sehingga dalam sub bab ini berisi tentang ringkasan yang menjelaskan alur dan proses penelitian yang dilakukan. Desain penelitian secara ringkas digambarkan pada Gambar. 3.1



Gambar. 3.1 Desain Penelitian

### 3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan data *time series*. Model analisis yang digunakan untuk meneliti hubungan kausalitas antar korupsi, GDP dan FDI di tiga negara ASEAN adalah uji kausalitas Granger. Penggunaan uji kausalitas Granger untuk mengetahui adanya hubungan timbal balik antara variabel – variabel yang diteliti. Dimana antara variabel dependent variabel independent terdapat hubungan timbal balik (kausalitas).

#### 3.3.1 Uji Akar Unit (*Unit Root test*)

Secara umum salah satu konsep penting dalam teori ekonometrika adalah anggapan stasioneritas (*stasionarity*), yang mempunyai konsekuensi penting dalam menerjemahkan data dan model ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh data yang terlalu besar selama periode pengamatan dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempelajari data *time series* dengan melihat stationer data dengan menjalankan prosedur uji akar-akar unit (*testing for unit roots*) dan uji derajat integrasi (*testing for degree of integration*). Data yang bersifat stationer artinya bahwa tidak terdapat variasi yang terlalu besar selama periode observasi dan memiliki kecenderungan untuk mendekati rata-rata (Kennedy, 2000:274).

Jika data yang digunakan tidak stationer maka dalam proses regresi akan dihasilkan regresi yang *spurious*. Akibat yang ditimbulkan dari *spurious regression* adalah koefisien regresi menjadi tidak efisien dan invalid (Makridakis, 1999:157). Prosedur yang dilakukan sebelum melakukan uji kointegrasi adalah menjalankan terlebih dahulu uji akar-akar unit dan derajat integrasi. Uji akar-akar unit dapat dilihat sebagai uji stasioneritas dan digunakan untuk mendeteksi apakah data yang digunakan stasioner atau tidak (Kuncoro, 2001:175).



Uji yang dikembangkan Dicky dan Fuller menggunakan penaksiran aoutoregresif berikut ini :

$$\Delta X_t = a_0 + a_1 B X_t + (b_1 B + b_2 B^2 + \dots + b_k B^k) \Delta X_t + V_t \dots \dots \dots (3.1)$$

$$\Delta X_t = c_0 + c_1 T + c_2 B X_t + (d_1 B + d_2 B^2 + \dots + d_k B^k) \Delta X_t^k + V_t \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan :

$$\Delta X_t = X_t - X_{(t-1)}$$

$$B X_t = X_{(t-1)}$$

$T$  = trend waktu

$X_t$  = variabel yang diamati pada periode  $t$

$B$  = operasi kelambanan waktu ke belakang (*backward lag operator*)

$k = N^{1/3}$  dimana  $N$  adalah jumlah observasi

Dari persamaan (3.1) dan (3.2), kemudian dibandingkan dengan nilai statistik *Dickey-Fuller* (DF) dan *Augmented Dickey Fuller* (ADF) dihitung dengan nilai DF dan ADF tabel. Kriteria pengujiannya yaitu jika DF (ADF) hitung lebih kecil dibandingkan dengan DF (ADF) tabel. Maka data tersebut tidak stationer. Dengan demikian, apabila DF (ADF) hitung lebih besar dari DF (ADF) tabel maka data tersebut stationer.

Bersamaan dengan uji akar-akar unit, dapat pula dilakukan uji derajat integrasi dengan tujuan untuk mengetahui pada derajat atau order seberapa data yang diteliti akan stationer. Uji ini akan dilakukan apabila uji akar-akar unit data yang diestimasi tidak stationer, dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan mengenai definisi dari integrasi suatu data, yaitu data runtun waktu  $X$  dikatakan berintegrasi pada derajat  $d$  atau ditulis  $I(d)$ , jika data tersebut perlu dideferensi sebanyak  $d$  kali untuk menjadi data yang stationer atau  $I(0)$ . Selain itu, uji ini merupakan perluasan dari uji akar-akar unit, sehingga untuk dapat menerapkan uji ini, perlu dilakukan uji otoregresif (*autoregressive*) berikut :

$$\Delta 2X_t = e_0 + e_1 BDX_t + (fB + \dots + f_k B^k) D^2 X_t + V_t \dots \dots \dots (3.3)$$

$$\Delta 2X_t = g_0 + g_1 T + g_2 BDX_t + (h_1 B + \dots + h_k B^k) D^2 X_t + V_t \dots \dots \dots (3.4)$$

$\Delta 2X_t$  adalah sama dengan  $(1 - B)DX_t$ . Nilai statistik DF dan ADF untuk mengetahui pada derajat keberapa suatu data akan stationer dapat dilihat pada nilai statistik t pada koefisien BDX. Jika  $e_1$  dan  $g_2$  sama dengan nol, maka variabel X dikatakan belum stationer pada diferensi pertama. Bila hal ini terjadi, maka uji derajat kointegrasi perlu dilanjutkan sehingga diperoleh data yang stationer.

Salah satu hal yang paling menentukan dalam uji stasioneritas adalah penentuan *lag* karena dengan *lag* yang terlalu sedikit maka residual dari regresi tidak akan menampilkan proses *white noise* sehingga model tidak dapat mengestimasi *actual error* secara tepat akibatnya  $\gamma$  dan standar kesalahan tidak diestimasi secara baik. Namun jika memasukkan terlalu banyak *lag* maka dapat mengurangi kemampuan untuk menolak  $H_0$  karena tambahan parameter yang terlalu banyak dapat mengurangi *degrees of freedom*. Penentuan *lag* optimal dapat digunakan dengan nilai *lag* yang diperoleh dari kriteria informasi *Aike Information Criteria* (AIC) dan *Schwartz* (SC) (Greene, 2000 : 717). Pemilihan *lag* optimal didasarkan pada nilai yang paling rendah dari *Aike Information Criteria* (AIC) dan *Schwartz* (SC).

### 3.3.2 Uji Kausalitas Granger

Dalam spesifikasi model regresi  $Y - a - \beta X - v$  menyatakan bahwa besaran  $X$  akan memberikan pengaruh terhadap  $Y$ , serta nilai  $R^2$  (*Coefficient determination*) sebagai ukuran kebaikan (*goodness of fit*) yang diperoleh tidak memperkenankan adanya interpretasi sebab-akibat dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dengan kata lain  $R^2$  hanya mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan menjelaskan yang dimiliki model dengan berdasarkan pengetahuan pada nilai  $X$  tertentu untuk meramalkan nilai  $Y$ . Jadi meskipun terdapat nilai korelasi yang tinggi antara  $X$  dan  $Y$  bukan berarti kemudian terdapat hubungan yang bersifat kausal antara  $X$  dan  $Y$  ataupun sebaliknya. Seringkali terdapat arah pengaruh yang dua arah diantara variabel bebas dan terikatnya, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat *jointly determined*, dan akan berakibat fatal

jika estimasi model hanya menyertakan arah hubungan yang searah. Dan untuk mencegah korelasi lancung semacam itu langkah terbaik yang harus dilakukan adalah dengan menspesifikasi dua model skaligus yaitu: regresi  $X$  terhadap  $Y$ , di satu sisi, dan di sisi lain, regresi  $Y$  terhadap  $X$ .

Studi yang pertama kali memfokuskan pada arah pengaruh antara variabel semacam itu dilakukan oleh Granger, yang mencoba meneliti pengaruh  $X$  terhadap  $Y$  dengan melihat apakah nilai sekarang (*current value*) dari  $Y$  bisa dijelaskan dengan nilai historis  $Y$  serta melihat apakah penambahan lag  $X$  bisa meningkatkan kemampuan menjelaskan model. Analisis uji kausalitas Granger (*Granger's Test of Causality*) merupakan petunjuk yang berguna mengenai adanya kausalitas dan arah kausalitas dan yang lebih penting adalah bahwa uji kausalitas Granger jauh lebih bermakna dibandingkan dengan uji yang berdasarkan korelasi biasa (Kuncoro, 2008:85). Penelitian ini menggunakan alat analisis uji kausalitas Granger (*Granger's Test of Causality*). Keterbatasan dalam analisis regresi adalah ketidakmampuan dalam mengungkapkan hubungan kausalitas meskipun analisis regresi diyakini dapat mengukur derajat hubungan statistik antar variabel. Fokus uji kausalitas Granger dalam penelitian ini adalah analisis deret waktu atau *time series*. Konsep kausalitas Granger dikenal sebagai konsep kausalitas sejati.

Variabel  $Y$  dapat dikatakan *Granger-caused*  $X$  bisa memprediksikan nilai  $Y$  dengan syarat bahwa koefisien lag  $X$  signifikan. Dengan menganggap bahwa  $X$  menyebabkan  $Y$  ( $X$  *Granger-caused*  $Y$ ) tetapi tidak sebaliknya, maka nilai historis  $Y$  tidak dapat digunakan untuk meramal besarnya  $X$ . Berkaitan dengan metode Granger sehubungan dengan variabel  $X$  dan  $Y$  diformulasikan dalam dua bentuk model regresi sebagai berikut (Arief, 1993:152) :

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (3.5)$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r a_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^s b_j X_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (3.6)$$

Dimana :

- $v_t$  : *error terms* yang diasumsikan tidak mengandung korelasi
- $m, n, r, s$  : *time lag*

Hipotesis nol adalah *X does not Granger –cause Y* dan prosedur diatas hanya memungkinkan diketahuinya arah hubungan dari *X* terhadap *Y* dan *Y* terhadap *X* dengan hepotesis nol adalah *Y does not Granger –cause X*. Jika kedua macam bentuk hubungan kausalitas tersebut menolak hipotesis nol maka berarti terdapat *lagged feedback effect*. Metodologi ekonometrik melalui pengujian kausalitas yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah dengan pengujian derajat integrasi menggunakan *Augmented Dickey-Fuller (ADF) Statistic* sebagai langkah awal. Jika data *time series* bersifat non stasioner dalam bentuk level *I(0)* maka diperlukan langkah kedua yaitu uji kointegrassi. Langkah selanjutnya yaitu penentuan *lag* yang optimal. Langkah yang terakhir yakni menitikberatkan pada tahapan pengujian *Granger Causality*. Penjabaran metode kausalitas Granger adalah sebagai berikut :

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (3.7)$$

$$Y_t = \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + v_t \dots \dots \dots (3.8)$$

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{k=1}^o c_k Z_{t-k} + v_t \dots \dots \dots (3.9)$$

$$Z_t = \sum_{k=1}^o c_k Z_{t-k} + \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + v_t \dots \dots \dots (3.10)$$

Keterangan:

$X$  : Indeks persepsi korupsi (CPI)

$Y$  : Pertumbuhan GDP

$Z$  : Pertumbuhan FDI

$m, n, o$  : *time lag*

$v_t$  : *error term*

Apabila masing-masing variabel antara CPI, GDP, dan FDI diformulasikan dalam metode Granger, maka persamaan tersebut menjadi :

1. Kausalitas CPI dan GDP

$$CPI_t = \sum_{i=1}^m a_i CPI_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j GDP_{t-j} + v_t \dots \dots \dots (3.11)$$

$$GDP_t = \sum_{j=1}^n b_j GDP_{t-j} + \sum_{i=1}^m a_i CPI_{t-i} + v_t \dots \dots \dots (3.12)$$

Terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi :

- a. *Unidirectional causality* (kausalitas searah) dari CPI terhadap GDP . Jika  $\sum a_i \neq 0$  ; sedangkan  $\sum b_j = 0$
- b. *Unidirectional causality* (kausalitas searah) dari GDP terhadap CPI . Jika  $\sum a_i = 0$  ; sedangkan  $\sum b_j \neq 0$
- c. *Bilateral causality* (kausalitas timbal balik), diindikasikan dengan signifikannya koefisien dari CPI dan GDP yang terbentuk, dapat dikatakan koefisien dari CPI dan GDP tidak sama dengan nol atau  $\sum a_i \neq 0$  dan  $\sum b_j \neq 0$
- d. *Independence* (tidak ada hubungan), diindikasikan dengan tidak signifikannya koefisien dari CPI dan GDP dari kedua persamaan tersebut atau  $\sum a_i = 0$  dan  $\sum b_j = 0$

2. Kausalitas CPI dan FDI

$$CPI_t = \sum_{i=1}^m a_i CPI_{t-i} + \sum_{k=1}^o c_k FDI_{t-k} + v_t \dots \dots \dots (3.13)$$

$$FDI_t = \sum_{k=1}^o c_k FDI_{t-k} + \sum_{i=1}^m a_i CPI_{t-i} + v_t \dots \dots \dots (3.14)$$

Terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi :

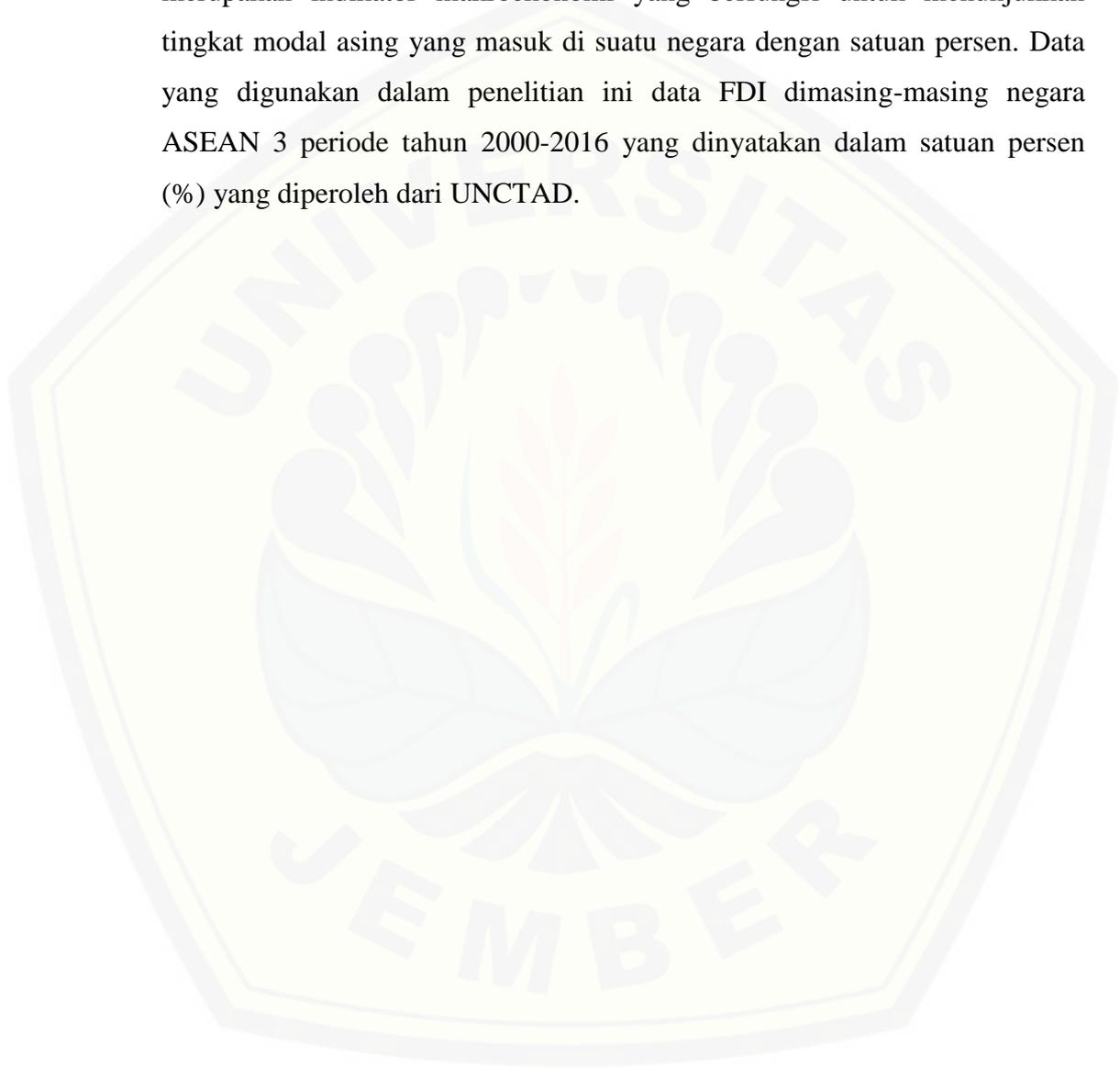
- a. *Unidirectional causality* (kausalitas searah) dari CPI terhadap FDI . Jika  $\sum a_i \neq 0$  ; sedangkan  $\sum c_k = 0$
- b. *Unidirectional causality* (kausalitas searah) dari FDI terhadap CPI . Jika  $\sum a_i = 0$  ; sedangkan  $\sum c_k \neq 0$
- c. *Bilateral causality* (kausalitas timbal balik), diindikasikan dengan signifikannya koefisien dari CPI dan FDI yang terbentuk, dapat dikatakan koefisien dari CPI dan FDI tidak sama dengan nol atau  $\sum a_i \neq 0$  dan  $\sum c_k \neq 0$
- d. *Independence* (tidak ada hubungan), diindikasikan dengan tidak signifikannya koefisien dari CPI dan FDI dari kedua persamaan tersebut atau  $\sum a_i = 0$  dan  $\sum c_k = 0$

### 3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini antara lain:

- a. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok (*World Bank* dan *IMF*). Korupsi memiliki banyak bentuk, seperti suap dan penggelapan dana publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran tingkat korupsi di masing-masing negara yang diteliti, peneliti menggunakan CPI sebagai variabel dengan satuan indeks. *Corruption Perseption Index* (CPI) adalah indeks gabungan yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. CPI merupakan suatu indeks dalam mengukur tingkat korupsi disuatu negara dengan menggunakan skala yang sudah ditetapkan 0-10 dimana skala 0 (sangat korupsi) sampai skala 10 (sangat bersih). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data pada periode tahun 2000-2016 yang diperoleh dari *Transparency International*.
- b. *Gross Domestic Product* (GDP) perkapita adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah geografis suatu negara selama periode satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *Gross Domestic Product* (GDP) perkapita di masing-masing negara ASEAN 3 periode tahun 2000-2016 yang dinyatakan dalam satuan persen yang diperoleh dari *World Bank*.

- c. *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah arus modal internasional dimana perusahaan disuatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya dinegara lain. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan variabel yang digunakan untuk mencerminkan penanaman modal asing langsung, merupakan indikator makroekonomi yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat modal asing yang masuk di suatu negara dengan satuan persen. Data yang digunakan dalam penelitian ini data FDI dimasing-masing negara ASEAN 3 periode tahun 2000-2016 yang dinyatakan dalam satuan persen (%) yang diperoleh dari UNCTAD.





## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Studi ini mengkaji hubungan kausal antara indikator makroekonomi dan korupsi di Indonesia, Thailand dan Filipina. Pengujian akar unit diterapkan untuk mengukur tingkat stationeritas variabel CPI, GDP, dan FDI. Selanjutnya dilakukan Uji kausalitas Granger diterapkan untuk menguji arah pengaruh kausal. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil uji akar unit dan uji kausalitas Granger di masing-masing negara :

#### 1. Indonesia

Ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut stasioner. Variabel CPI dan GDP stasioner pada derajat satu, sedangkan variabel FDI stasioner pada derajat ke dua. Ditemukan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah dari GDP ke CPI di Indonesia dan hubungan kausalitas satu arah dari FDI ke CPI.

#### 2. Thailand

Ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut stasioner. Variabel CPI dan FDI stasioner pada derajat satu, sedangkan GDP stasioner pada tingkat level. Ditemukan, bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara variabel GDP dengan CPI.

#### 3. Filipina

Ditemukan bahwa ketiga variabel tersebut stasioner. Variabel CPI stasioner pada derajat kedua, sedangkan untuk variabel GDP dan FDI stasioner pada derajat satu. Ditemukan, bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah antara variabel CPI dengan FDI.

Hasil pengujian memberikan hasil bahwa indikator makroekonomi memiliki hubungan terhadap indeks persepsi korupsi untuk studi kasus di Indonesia dan Thailand, hasil pengujian di Filipina menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi memiliki hubungan kausalitas satu arah terhadap FDI. Kebijakan otoritas terkait di masing-masing negara ASEAN 3. Berdasarkan hasil estimasi pengujian indikator makroekonomi terhadap indeks persepsi korupsi pada periode tahun 2000 sampai dengan 2016 dengan menggunakan metode analisis kausalitas

Granger membuktikan terdapat hubungan kausalitas satu arah antara indeks persepsi korupsi dengan indikator makroekonomi dan terdapat hubungan satu arah antara indikator makroekonomi dengan indeks persepsi korupsi di masing-masing negara yang diteliti.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pengujian kausalitas korupsi dan indikator makro ekonomi di ASEAN 3 dengan metodologi analisis kausalitas Granger pengaplikasian kebijakan yang dilakukan dalam upaya menurunkan indeks persepsi korupsi diperlukan peran pemerintah di masing-masing negara ASEAN 3. Oleh karena itu dalam upaya menurunkan indeks persepsi korupsi diperlukan penguatan lembaga anti korupsi antar negara di kawasan ASEAN 3.

Secara ekonomi, pergerakan indikator makroekonomi memiliki hubungan terhadap indeks persepsi korupsi di Indonesia dan Thailand. Sementara itu penggunaan metode analisis kausalitas Granger dapat memberikan pandangan dalam penelitian lain yang ingin menjelaskan pergerakan indeks persepsi korupsi dengan indikator makroekonomi di negara berkembang. Bagi penelitian selanjutnya adalah terkait tentang metode penelitian yang digunakan, diharapkan menggunakan metode yang lebih akurat dalam menggambarkan upaya penurunan indeks persepsi korupsi. Sementara itu penggunaan variabel makroekonomi sebagai proksi fundamental makroekonomi lebih bervariasi dengan rentan periode yang lebih lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Verdier, T. 1998. Property Rights, Corruption and the Allocation of Talent: A General Equilibrium Approach. *The economic Journal*, 108, (450), 1381-1403.
- Aidt, T.S. 2009, "Corruption, Institutions, and Economic Development", *Oxford review of Economic Policy*, Vol. 25 No. 2, pp. 271-291.
- Ajilore, O., dan Elumilde, D.O. 2007. "Does Corruption Affect Economic Growth?". *Latin American Journal of Economics*, 49 (2), 277-305.
- Asieudu, e. & Feeman, J. 2009. "The Effect of Corruption on Investment Growth: Evidence from Firms in latin America, Sub-Saharan Africa, and Transition Countries", *Rev. Dev. Econ.*, vol. 13: 200-214
- Asongu, S.A. 2013. "Fighting Corruption in Africa: do Existing Corruption Control Levels Matter?", *International Journal of Development Issues*, Vol. 12 No. 1, pp. 36-52.
- Balboa, J. dan E. M. Medalla. 2009. "Anti-Corruption and governance: the Philippine Experience (revised)", *Conference on Evidence-Based Anti-Corruption Policy*, June 5-th, Bangkok.
- Bayley, D. H. 1966. *The Effects of Corruption in a Developing Nation*, *Western Political Quartely*, 19 (4), 719-732.
- Brown, Michael. 1995. "The Keynesian Model", dalam *Models in Political Economy*. London: Penguin, pp. 57-71.
- Cameron, L.A., Chaudhuri, A., Erkal, N. and Gangadharan, L. 2009, "Propensities to Engage in and Punish Corrupt Behaviour: Experimental Evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore", *Journal of Public Economics*, Vol. 93 No 7/8, pp. 843-851.
- Chetwynd E, Frances C, Bertram S. 2003. "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature (Final Report)". *Washington DC: Management System International*.
- Chai-Anan S. 1977. "Problem of Bureaucratic Corruption in Thailand: A Study of Legal Codes, Administrative and Institutional Arrangements," *Paper presented at the Bureaucratic Behaviour in Asia Project*, Pattaya, Thailand, 18-23 January.
- Chua, Yvonne T. 1999. *Robbed: An Investigation of Corruption in Philippine Education*, Metro Manila: Philippine Center for Investigative Journalism.

- Cimpoeru, M.V., & Cimpoeru, V. 2015, "Budgetary Transparency – an Improving Factor Corruption Control And Economic Performance", *Procedia Economics and Finance*, 27 (2015) 579-586.
- Colombatto, E. 2003. "Why is Corruption Tolerated?", *Review of Austrian Economics*, 16 (4), 363-379.
- Corpuz, Onofre D. 1957. *The Bureaucracy in the Philippines*, Quezon City. Quezon City: Institute of Public Administration, University of the Philippines.
- Desbordes, Rodolphe & Vincent Vicard. 2007. "Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties, an International Political Perspective", *Journal of Comparative Economics Elsevier* vo. 37, hal 1-23.
- D'Agostino, G., Dunne, J.P., and Pironi, L. 2016, "Government Spending, Corruption and Economic Growth", *World Development*.
- Dridi, M. 2013. "Corruption and Growth: The Transmission Channels". *Journal of Business Studies Quarterly*, 4(4), 121-152.
- Fahmi, Irham. 2006. *Analisis Investasi dalam Perpektif Ekonomi dan Politik*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Ehrlich I, Lui FT. 1999. "Bureaucratic Corruption and Endogenous economic Growth". *Journal of Political Economy*. 6 (107) pt 2j.
- Glaeser, E., & Saks, R. E. 2006. "Corruption in America". *Journal of Public Economics*, 90, 1053-1072.
- Haque, M.E. & Neanidis, C.K. 2009, "Fiscal Transparency and Corruption Centre for Growth And Business Cycle Research", *Economic Studies*, vol.114: 1-7.
- Hoppe, Hans-Hermann. 2007. *Teori Umum Keynes dalam Pandangan Mesesian*. Ciputat, Indonesia.
- Huang, C.-J. 2015, "Is Corruption Bad for Economic Growth? Evidence from Asia-Pacific countries", *North American Journal of Economics and Finance*, vol 554: 1-10.
- Huang, C.-J. 2013, "Corruption and Income Inequality in ASIAN Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Test", *Romanian Journal of Economic Forecasting*.
- Huntington, S. P. 1968. "Political Order in Changinh Societies". *New Haven: Yale University Press*.

- Kaufman D, Wei S. 1998. "Does 'Grease Money' Speed Up the Wheels of Commerce?". *Mimeo. The World Bank*.
- Keefer, P. and Knack, S. 1997, "Why Don't Poor Counties Catch Up? A Cross National Test of an Institutional Explanation", *Economic Inquiry*, Vol. 35, pp. 590-602.
- King. Dwight Y. 2000. "The Indonesian Economy in 1999: Some Comments. " In Chirs Manning and Peter van Diermen eds. *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis*. London: Zed Books: 77-84.
- Klitgaard, R. 1964. "Controlling Corruption". *Berkley: University of California press*.
- Kuncoro, A. 2003, "Bribery at The Local Government Level in Indonesia: A Preliminary Descriptive Analysis", *University of Indonesia mimeo*.
- Leff, N. H.1964. "Economic Development through Bureaucratic Corruption". *The American Behavioral Scientist*, 8, 8-14.
- Liddle, R. William. 1997. *Leadership and Culture in Indonesia Politics*. Sydney: Allen & Unwin.
- Lui, F. T. 1985. "An Equilibrium Queuing Model of Bribery". *Journal of Political Economy*. 93 (4), 760-781.
- Johnson, N., LaFountain, C., & Yamarik, S. 2011. "Corruption is Bad for Growth (even in the United States)". *Public Choice*, 147, 377-393.
- Maiyaki, A. 2010. "The Effects of Corruption on the Nigerian Economy". *IBA Business Review*, 5 (2), 111-126.
- Mallik, G. and Saha, S. 2016, "Corruption and Growth: a Complex Relationship", *International Journal of Development Issues*, Vol. 15 No. 2, pp. 113-129.
- Mankiw N. G. 2006. *Makroekonomi Edisi ke Enam*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Mauro, P. 1995. "Corruption and Growth", *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110 No. 3, pp. 681-712.
- Mo P. 2001. "Corruption and economic Growth". *Journal of Comparative Economics*. 29: 66-79.
- Meon, P.-G. and Weill L. 2008, "Is Corruption Efficient Grease?", *BOFIT Discussion Papers*, 20.

- Monte, A. D., & Papagni, E. 2001. "Public expenditure, Corruption, and Economic Growth: The case of Italy". *European Journal of Political Economy*, 17 (1), 1-16.
- Paul, B.P. 2010. "Does corruption foster growth in Bangladesh?", *International Journal of Development Issues*, Vol. 9 No.3, pp. 246-262. (3), 429-456.
- Pasuk, P dan Sungsidh, P. 1996. *Corruption and Democracy in Thailand*, (2<sup>nd</sup> ed). Bangkok: Silkworm Books.
- Pellegrini L, Gerlagh R. 2004. "Corruption's Effect on Growth and its Transmission Channels". *Kyklos*. 57.
- Petrovic, Evica. 2009. "Country Risk and Effects of Foreign Direct Investment", *Jornal of Facta Universitas series Economics and Organization* Vol. 6 no. 1, hal 9-22.
- Quah, Jon S. T. 1982."Bureaucratic Corruption in the ASEAN Countries: A Comparative Analysis of Their Anti-Corruption Strategies". *Journal of Southeast Asian Studies*, 13 (1).
- Robertson-Snape, Fiona. 1999. "Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesia." *Third World Quarterly*, June, Vol.20, No. 3: 589-602.
- Rosadi, D. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Runtun Waktu Terapan dengan R*. Yogyakarta: CV Andi.
- Rose-Ackerman, S. 1999. "Corruption and Government: Causes, consequences, and Reform". *Cambrige : Cambrige University Press*.
- Sasana H. 2004. "Kegagalan Pemerintah Dalam Pembangunan". *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol.1 No.1 Hal 31-38.
- Soessastro, Hadi. 2000. "Governance and the Crisis in Indonesia." *In Peter Drysdale ed. Reform and Recovery in East Asia: the Role of the State and Economic Enterprice*. London: Rotledge: 120-145.
- Svensson, J. 2005, "Eight Questions about Corruption", *Journal of Economics Perspectives*, Vol 19 No. 3, pp. 19-42.
- Shera, A., Dosti, B., & Grabova, P. 2014. "Corruption impact on economic growth: An empirical analysis". *Journal of Economic Development, Management, IT, Finance & marketing*, 6 (2), 57-77.

- Shleifer A, Vishy RW. 1993. "Why is rent-Seeking So Costly to Growth" *American Review*. May, 409-414.
- Sukirno S. 2000. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. UI-Press. Jakarta.
- Tanzi, V. 1998. "Corruption around the world: Cause, Consequences, Scope, and Cures". *IMF Staff Paper*, 45 (4), 559-594
- Todaro MP. 1981. "Economic Development in The Third World Second Edition". *Published in The USA by Longman Inc. New York*.
- Timberman, David G. 1991. *A Changeless Land: Continuity and Change in Philippine Politics*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Transparency International. 2016. Corruption Perception Index Kawasan Asia Pasifik Tahun 2000-2016. [<http://www.transparency.org/>] diakses pada 20 Maret 2017.
- Treisman, D. 2000. "The Causes of Corruption: A Cross-National Study". *Journal of Public Economics*, 76: 3, pp 399-457.
- Treisman, D. 2007. "What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research?". *Annual Review of Political Science*, 10, 211-244.
- Tsaturyan, & Bryson. 2009. "Corruption and Development: The American case", *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 2 (4), 356-371.
- Vail, V. and Hanoteau, J. 2010, "Corruption, Manufacturing Plant Growth, and The Asian Paradox: Indonesian Evidence", *World Development*, Vol. 38, No. 5, pp. 693-705.
- Varela, Amelia P. 1995. "Different Faces of Filipino Administrative Culture," in Proserpina Domigo Tapales & Nestor N Pilar (eds), *Public Administration by the Year 2000: Looking Back into the Future*, Quezon City: Colloge of Public Administration, Universtiy of the Philippines.
- Virta, H. 2010, "The Linkage between Corruption and Shadow Economy Size: Does Geography Matter?", *International Journal of Development Issues*, Vol. 9 No.1, pp. 4-24.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Edisi Pertama*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

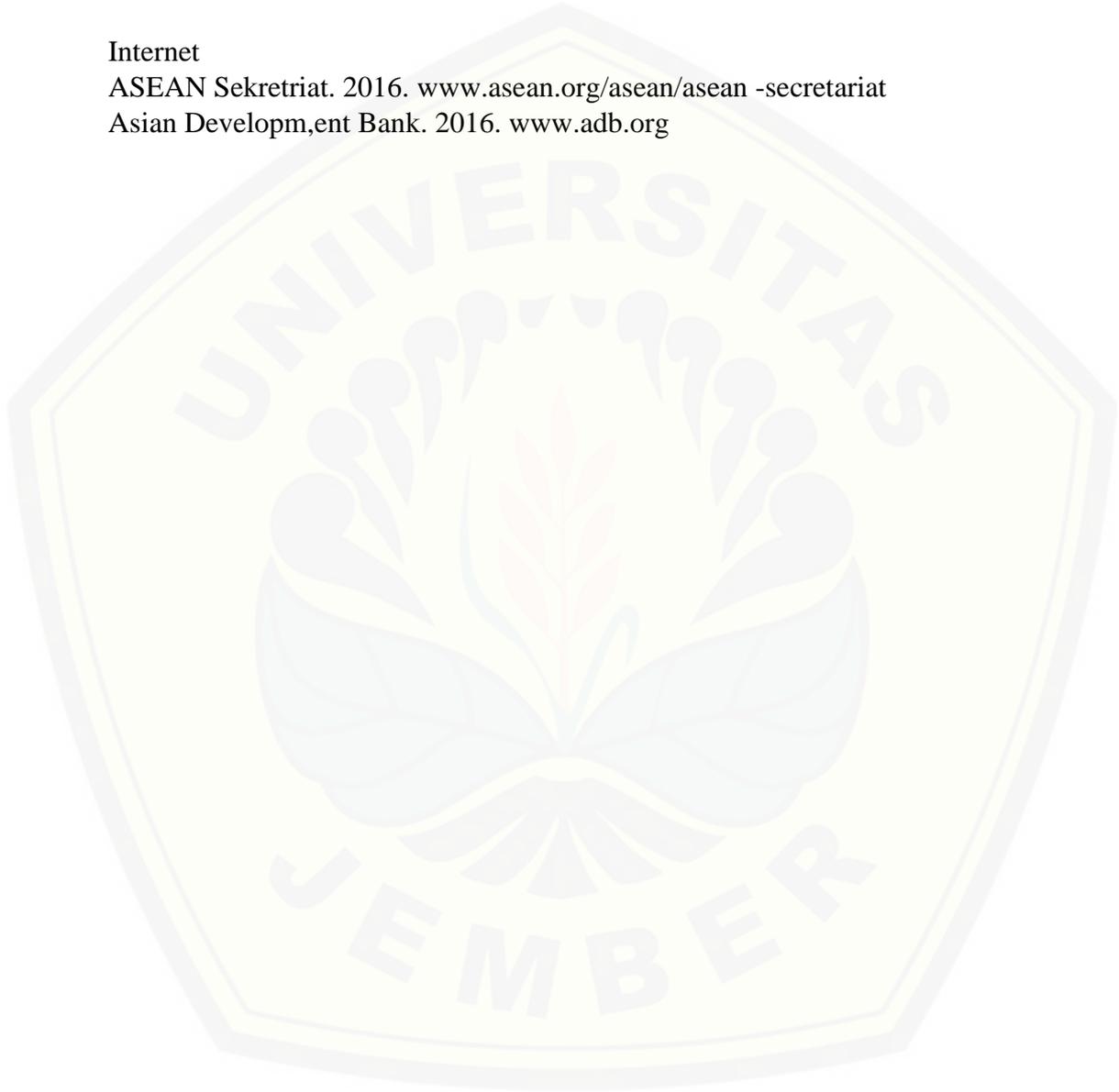
Wedeman, A. 1997. Looters, Rent-Scrapers, and dividend-collectors: Corruption and Growth in Zaire, South Korea, and The Philippines. *Journal of Developing Areas*, 31, 457-478.

Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Publik, Kajian Teoritis dan Kajian Empiris*. Jojakarta: Pustaka Pelajar.

Internet

ASEAN Sekretariat. 2016. [www.asean.org/asean/asean-secretariat](http://www.asean.org/asean/asean-secretariat)

Asian Development Bank. 2016. [www.adb.org](http://www.adb.org)





**LAMPIRAN****Lampiran A. Data Penelitian****1. Indonesia**

Tahun	CPI	GDP	FDI
2000	1,7	3,468	-2,583
2001	1,9	2,21	-1,738
2002	1,9	3,052	0,069
2003	1,9	3,0	-0,238
2004	2,0	3,59	0,693
2005	2,2	4,25	2,738
2006	2,4	4,07	1,266
2007	2,3	4,91	1,505
2008	2,6	4,59	1,715
2009	2,8	3,24	0,849
2010	2,8	4,83	1,823
2011	3,0	4,79	2,155
2012	3,2	4,68	2,085
2013	3,2	4,24	2,066
2014	3,4	3,73	2,460
2015	3,6	3,65	1,930
2016	3,7	3,83	0.281

**2. Thailand**

Tahun	CPI	GDP	FDI
2000	3,2	3,38	2,703
2001	3,2	2,49	4,225
2002	3,2	5,27	2,498
2003	3,3	6,39	3,429
2004	3,6	5,56	3.388
2005	3,8	3,57	4,227
2006	3,6	4,33	3,851
2007	3,3	4,84	3,011
2008	3,5	1,19	3,106
2009	3,4	-1,19	2,761
2010	3,5	6,99	4,273
2011	3,4	0,36	0,882
2012	3,7	6,75	4,155
2013	3,5	2,28	3,963
2014	3,8	0,51	0,873
2015	3,8	2,58	1,442
2016	3,5	2,92	0.392

**3. Filipina**

Tahun	CPI	GDP	FDI
2000	2,8	2,199	2,764
2001	2,9	0,732	0,255
2002	2,6	1,497	1,895
2003	2,5	2,847	0,585
2004	2,6	4,623	0,752
2005	2,5	2,84	1,798
2006	2,5	3,403	2,390
2007	2,5	4,845	1,952
2008	2,3	2,479	0,886
2009	2,4	-0,463	1,116
2010	2,4	5,903	0,650
2011	2,6	1,972	0,826
2012	3,4	4,934	0,978
2013	3,6	5,309	0,892
2014	3,8	4,426	2,393
2015	3,5	4,383	1,688
2016	3,5	5,264	2,610

## Lampiran B. Uji Stationer

### B.1 Indonesia

#### 1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: CPI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.768943	0.9990
Test critical values:		
1% level	-4.004425	
5% level	-3.098896	
10% level	-2.690439	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(CPI)

Method: Least Squares

Date: 10/08/17 Time: 22:25

Sample (adjusted): 2003 2016

Included observations: 14 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI(-1)	0.088372	0.049958	1.768943	0.1073
D(CPI(-1))	-0.643267	0.246544	-2.609141	0.0261
D(CPI(-2))	-0.698306	0.230536	-3.029051	0.0127
C	0.056028	0.120029	0.466792	0.6507
R-squared	0.534046	Mean dependent var		0.128571
Adjusted R-squared	0.394260	S.D. dependent var		0.113873
S.E. of regression	0.088626	Akaike info criterion		-1.773816
Sum squared resid	0.078547	Schwarz criterion		-1.591228
Log likelihood	16.41671	Hannan-Quinn criter.		-1.790718
F-statistic	3.820448	Durbin-Watson stat		2.124179
Prob(F-statistic)	0.046439			

Tingkat *first difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.208052	0.0012
Test critical values:		
1% level	-4.004425	
5% level	-3.098896	
10% level	-2.690439	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 14

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(CPI,2)

Method: Least Squares

Date: 10/08/17 Time: 22:29

Sample (adjusted): 2003 2016

Included observations: 14 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CPI(-1))	-2.000000	0.384021	-5.208052	0.0003
D(CPI(-1),2)	0.562500	0.237485	2.368568	0.0372
C	0.250000	0.053330	4.687783	0.0007
R-squared	0.770469	Mean dependent var		0.007143
Adjusted R-squared	0.728736	S.D. dependent var		0.185904
S.E. of regression	0.096825	Akaike info criterion		-1.644422
Sum squared resid	0.103125	Schwarz criterion		-1.507481
Log likelihood	14.51096	Hannan-Quinn criter.		-1.657099
F-statistic	18.46190	Durbin-Watson stat		1.905303
Prob(F-statistic)	0.000305			

## 2. Variabel GDP perkapita

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: GDP has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.201338	0.2130
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GDP)

Method: Least Squares

Date: 09/25/17 Time: 13:26

Sample (adjusted): 2001 2016

Included observations: 16 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	-0.502569	0.228302	-2.201338	0.0450
C	1.989431	0.909281	2.187916	0.0461
R-squared	0.257132	Mean dependent var		0.022500
Adjusted R-squared	0.204070	S.D. dependent var		0.755873
S.E. of regression	0.674351	Akaike info criterion		2.166337
Sum squared resid	6.366492	Schwarz criterion		2.262911
Log likelihood	-15.33070	Hannan-Quinn criter.		2.171282
F-statistic	4.845890	Durbin-Watson stat		1.836435
Prob(F-statistic)	0.044987			

Tingkat *first difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.608801	0.0005
Test critical values:		
1% level	-3.959148	
5% level	-3.081002	
10% level	-2.681330	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GDP,2)

Method: Least Squares

Date: 09/25/17 Time: 13:27

Sample (adjusted): 2002 2016

Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDP(-1))	-1.306004	0.232849	-5.608801	0.0001
C	0.111478	0.175743	0.634320	0.5369

R-squared	0.707593	Mean dependent var	0.096067
Adjusted R-squared	0.685101	S.D. dependent var	1.212790
S.E. of regression	0.680568	Akaike info criterion	2.191787
Sum squared resid	6.021244	Schwarz criterion	2.286194
Log likelihood	-14.43841	Hannan-Quinn criter.	2.190782
F-statistic	31.45865	Durbin-Watson stat	2.022970
Prob(F-statistic)	0.000085		

## 3. Variabel Investasi Asing Langsung (FDI)

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: FDI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.988099	0.0575
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 18:36

Sample (adjusted): 2001 2016

Included observations: 16 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FDI(-1)	-0.426192	0.142630	-2.988099	0.0098
C	0.626548	0.256240	2.445163	0.0283
R-squared	0.389412	Mean dependent var		0.179055
Adjusted R-squared	0.345799	S.D. dependent var		1.028260
S.E. of regression	0.831684	Akaike info criterion		2.585741
Sum squared resid	9.683783	Schwarz criterion		2.682315
Log likelihood	-18.68593	Hannan-Quinn criter.		2.590686
F-statistic	8.928736	Durbin-Watson stat		2.175289
Prob(F-statistic)	0.009779			



Tingkat *first difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.666651	0.8220
Test critical values:		
1% level	-4.057910	
5% level	-3.119910	
10% level	-2.701103	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 13

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI,2)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 18:38

Sample (adjusted): 2004 2016

Included observations: 13 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(FDI(-1))	-0.469729	0.704611	-0.666651	0.5217
D(FDI(-1),2)	-0.626693	0.494431	-1.267503	0.2368
D(FDI(-2),2)	-0.616060	0.291060	-2.116609	0.0634
C	-0.169946	0.320415	-0.530394	0.6087
R-squared	0.697917	Mean dependent var		-0.103097
Adjusted R-squared	0.597223	S.D. dependent var		1.453555
S.E. of regression	0.922495	Akaike info criterion		2.924190
Sum squared resid	7.658971	Schwarz criterion		3.098021
Log likelihood	-15.00723	Hannan-Quinn criter.		2.888460
F-statistic	6.931050	Durbin-Watson stat		1.469490
Prob(F-statistic)	0.010268			

Tingkat *second difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(FDI,2) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.281356	0.0001
Test critical values:		
1% level	-4.057910	
5% level	-3.119910	
10% level	-2.701103	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 13

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI,3)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 18:40

Sample (adjusted): 2004 2016

Included observations: 13 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(FDI(-1),2)	-2.673429	0.367161	-7.281356	0.0000
D(FDI(-1),3)	0.749364	0.205539	3.645855	0.0045
C	-0.295289	0.252140	-1.171135	0.2687
R-squared	0.900845	Mean dependent var		0.076759
Adjusted R-squared	0.881014	S.D. dependent var		2.598989
S.E. of regression	0.896503	Akaike info criterion		2.818544
Sum squared resid	8.037173	Schwarz criterion		2.948917
Log likelihood	-15.32053	Hannan-Quinn criter.		2.791746
F-statistic	45.42625	Durbin-Watson stat		1.590262
Prob(F-statistic)	0.000010			

## B.2 Thailand

### 1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: CPI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.440456	0.1471
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(CPI)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 21:11

Sample (adjusted): 2001 2016

Included observations: 16 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI(-1)	-0.525090	0.215160	-2.440456	0.0286
C	1.850000	0.751715	2.461038	0.0275
R-squared	0.298451	Mean dependent var		0.018750
Adjusted R-squared	0.248340	S.D. dependent var		0.207264
S.E. of regression	0.179694	Akaike info criterion		-0.478650
Sum squared resid	0.452061	Schwarz criterion		-0.382076
Log likelihood	5.829200	Hannan-Quinn criter.		-0.473705
F-statistic	5.955828	Durbin-Watson stat		2.011404
Prob(F-statistic)	0.028563			

Tingkat *first difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.370974	0.0047
Test critical values:		
1% level	-3.959148	
5% level	-3.081002	
10% level	-2.681330	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 15

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(CPI,2)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 21:12

Sample (adjusted): 2002 2016

Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CPI(-1))	-1.283582	0.293660	-4.370974	0.0008
C	0.031343	0.056741	0.552396	0.5900
R-squared	0.595084	Mean dependent var		-0.020000
Adjusted R-squared	0.563936	S.D. dependent var		0.325576
S.E. of regression	0.214995	Akaike info criterion		-0.112841
Sum squared resid	0.600896	Schwarz criterion		-0.018434
Log likelihood	2.846305	Hannan-Quinn criter.		-0.113846
F-statistic	19.10541	Durbin-Watson stat		1.902466
Prob(F-statistic)	0.000757			

## 2. Variabel GDP perkapita

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: GDP has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.475195	0.0035
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GDP)

Method: Least Squares

Date: 09/26/17 Time: 05:56

Sample (adjusted): 2001 2016

Included observations: 16 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	-1.178609	0.263365	-4.475195	0.0005
C	4.045488	1.104813	3.661694	0.0026
R-squared	0.588567	Mean dependent var		-0.028375
Adjusted R-squared	0.559178	S.D. dependent var		3.771654
S.E. of regression	2.504167	Akaike info criterion		4.790258
Sum squared resid	87.79192	Schwarz criterion		4.886831
Log likelihood	-36.32206	Hannan-Quinn criter.		4.795203
F-statistic	20.02737	Durbin-Watson stat		1.959899
Prob(F-statistic)	0.000523			

## 3. Variabel Investasi Asing Langsung (FDI)

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: FDI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.991893	0.0571
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 21:20

Sample (adjusted): 2001 2016

Included observations: 16 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FDI(-1)	-0.921584	0.308027	-2.991893	0.0097
C	2.666126	0.999799	2.666661	0.0184
R-squared	0.390016	Mean dependent var		-0.144429
Adjusted R-squared	0.346446	S.D. dependent var		1.693482
S.E. of regression	1.369056	Akaike info criterion		3.582589
Sum squared resid	26.24041	Schwarz criterion		3.679163
Log likelihood	-26.66071	Hannan-Quinn criter.		3.587534
F-statistic	8.951423	Durbin-Watson stat		1.714456
Prob(F-statistic)	0.009706			

Tingkat *first difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.120057	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.959148	
5% level	-3.081002	
10% level	-2.681330	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 15

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI,2)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 21:23

Sample (adjusted): 2002 2016

Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(FDI(-1))	-1.566617	0.220029	-7.120057	0.0000
C	-0.303193	0.369271	-0.821058	0.4264
R-squared	0.795903	Mean dependent var		-0.171501
Adjusted R-squared	0.780203	S.D. dependent var		3.046733
S.E. of regression	1.428384	Akaike info criterion		3.674531
Sum squared resid	26.52366	Schwarz criterion		3.768937
Log likelihood	-25.55898	Hannan-Quinn criter.		3.673525
F-statistic	50.69522	Durbin-Watson stat		2.407922
Prob(F-statistic)	0.000008			

### B.3 Filipina

#### 1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: CPI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.440456	0.1471
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
 Dependent Variable: D(CPI)  
 Method: Least Squares  
 Date: 09/23/17 Time: 21:11  
 Sample (adjusted): 2001 2016  
 Included observations: 16 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CPI(-1)	-0.525090	0.215160	-2.440456	0.0286
C	1.850000	0.751715	2.461038	0.0275
R-squared	0.298451	Mean dependent var		0.018750
Adjusted R-squared	0.248340	S.D. dependent var		0.207264
S.E. of regression	0.179694	Akaike info criterion		-0.478650
Sum squared resid	0.452061	Schwarz criterion		-0.382076
Log likelihood	5.829200	Hannan-Quinn criter.		-0.473705
F-statistic	5.955828	Durbin-Watson stat		2.011404
Prob(F-statistic)	0.028563			



Tingkat *first difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.846881	0.0754
Test critical values:		
1% level	-3.959148	
5% level	-3.081002	
10% level	-2.681330	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 15

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(CPI,2)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 21:35

Sample (adjusted): 2002 2016

Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CPI(-1))	-0.767380	0.269551	-2.846881	0.0137
C	0.029144	0.070634	0.412611	0.6866
R-squared	0.384024	Mean dependent var		-0.006667
Adjusted R-squared	0.336642	S.D. dependent var		0.330512
S.E. of regression	0.269191	Akaike info criterion		0.336778
Sum squared resid	0.942032	Schwarz criterion		0.431184
Log likelihood	-0.525832	Hannan-Quinn criter.		0.335772
F-statistic	8.104731	Durbin-Watson stat		1.833341
Prob(F-statistic)	0.013739			

Tingkat *second difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(CPI,2) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.422456	0.0002
Test critical values:		
1% level	-4.004425	
5% level	-3.098896	
10% level	-2.690439	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 14

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(CPI,3)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 21:13

Sample (adjusted): 2003 2016

Included observations: 14 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(CPI(-1),2)	-1.578571	0.245789	-6.422456	0.0000
C	-0.021429	0.077725	-0.275696	0.7875
R-squared	0.774639	Mean dependent var		-0.021429
Adjusted R-squared	0.755859	S.D. dependent var		0.588582
S.E. of regression	0.290822	Akaike info criterion		0.499352
Sum squared resid	1.014929	Schwarz criterion		0.590646
Log likelihood	-1.495466	Hannan-Quinn criter.		0.490901
F-statistic	41.24794	Durbin-Watson stat		2.044887
Prob(F-statistic)	0.000033			

## 2. Variabel GDP perkapita

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: GDP has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.475195	0.0035
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GDP)

Method: Least Squares

Date: 09/26/17 Time: 05:56

Sample (adjusted): 2001 2016

Included observations: 16 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GDP(-1)	-1.178609	0.263365	-4.475195	0.0005
C	4.045488	1.104813	3.661694	0.0026
R-squared	0.588567	Mean dependent var		-0.028375
Adjusted R-squared	0.559178	S.D. dependent var		3.771654
S.E. of regression	2.504167	Akaike info criterion		4.790258
Sum squared resid	87.79192	Schwarz criterion		4.886831
Log likelihood	-36.32206	Hannan-Quinn criter.		4.795203
F-statistic	20.02737	Durbin-Watson stat		1.959899
Prob(F-statistic)	0.000523			

Tingkat *first difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.133394	0.0014
Test critical values:		
1% level	-4.004425	
5% level	-3.098896	
10% level	-2.690439	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 14

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(GDP,2)

Method: Least Squares

Date: 09/26/17 Time: 06:00

Sample (adjusted): 2003 2016

Included observations: 14 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GDP(-1))	-2.359630	0.459663	-5.133394	0.0003
D(GDP(-1),2)	0.494072	0.256987	1.922558	0.0808
C	0.573372	0.549893	1.042697	0.3195
R-squared	0.841359	Mean dependent var		0.008286
Adjusted R-squared	0.812515	S.D. dependent var		4.676564
S.E. of regression	2.024932	Akaike info criterion		4.436358
Sum squared resid	45.10383	Schwarz criterion		4.573299
Log likelihood	-28.05451	Hannan-Quinn criter.		4.423682
F-statistic	29.16940	Durbin-Watson stat		2.148060
Prob(F-statistic)	0.000040			

## 3. Variabel Investasi Asing Langsung (FDI)

Tingkat level (*intercept*)

Null Hypothesis: FDI has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.975918	0.0090
Test critical values:		
1% level	-3.920350	
5% level	-3.065585	
10% level	-2.673459	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 16

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 21:40

Sample (adjusted): 2001 2016

Included observations: 16 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FDI(-1)	-1.036456	0.260683	-3.975918	0.0014
C	1.407565	0.404672	3.478284	0.0037
R-squared	0.530326	Mean dependent var		-0.009639
Adjusted R-squared	0.496778	S.D. dependent var		1.080297
S.E. of regression	0.766343	Akaike info criterion		2.422094
Sum squared resid	8.221937	Schwarz criterion		2.518668
Log likelihood	-17.37675	Hannan-Quinn criter.		2.427040
F-statistic	15.80792	Durbin-Watson stat		1.296939
Prob(F-statistic)	0.001380			

Tingkat *first difference (intercept)*

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.950508	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.959148	
5% level	-3.081002	
10% level	-2.681330	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 15

## Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(FDI,2)

Method: Least Squares

Date: 09/23/17 Time: 21:41

Sample (adjusted): 2002 2016

Included observations: 15 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(FDI(-1))	-1.462644	0.183969	-7.950508	0.0000
C	0.123773	0.193861	0.638462	0.5343
R-squared	0.829420	Mean dependent var		0.228739
Adjusted R-squared	0.816298	S.D. dependent var		1.747716
S.E. of regression	0.749078	Akaike info criterion		2.383620
Sum squared resid	7.294541	Schwarz criterion		2.478026
Log likelihood	-15.87715	Hannan-Quinn criter.		2.382614
F-statistic	63.21058	Durbin-Watson stat		1.698363
Prob(F-statistic)	0.000002			

## Lampiran C. Uji Kausalitas Granger

### C.1 Indonesia

#### 1. Variabel GDP ke CPI

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/05/17 Time: 22:21

Sample: 2000 2016

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	16	4.68519	0.0496
CPI does not Granger Cause GDP		0.56492	0.4657

#### 2. Variabel FDI ke CPI

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 22:50

Sample: 2000 2016

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	16	1.10469	0.3124
CPI does not Granger Cause FDI		0.10797	0.7477

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 22:51

Sample: 2000 2016

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	15	3.07316	0.0911
CPI does not Granger Cause FDI		0.42883	0.6627

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 22:51

Sample: 2000 2016

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	14	7.84129	0.0122
CPI does not Granger Cause FDI		0.24194	0.8645

## C.2 Thailand

### 1. Variabel GDP ke CPI

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:13

Sample: 2000 2016

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	16	0.35808	0.5599
CPI does not Granger Cause GDP		1.03369	0.3278

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:13

Sample: 2000 2016

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	15	2.98847	0.0961
CPI does not Granger Cause GDP		0.60207	0.5664

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:13

Sample: 2000 2016

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	14	2.03045	0.1983
CPI does not Granger Cause GDP		2.78592	0.1194

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:14

Sample: 2000 2016

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	13	1.01468	0.4945
CPI does not Granger Cause GDP		3.23979	0.1406

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:14

Sample: 2000 2016

Lags: 5

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	12	3.64768	0.3771
CPI does not Granger Cause GDP		35.5629	0.1266



## 2. Variabel FDI ke CPI

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:19

Sample: 2000 2016

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	16	1.05335	0.3235
CPI does not Granger Cause FDI		1.46854	0.2471

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:19

Sample: 2000 2016

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	15	1.50957	0.2674
CPI does not Granger Cause FDI		0.77635	0.4859

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:20

Sample: 2000 2016

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	14	1.03056	0.4355
CPI does not Granger Cause FDI		1.45137	0.3075

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:20

Sample: 2000 2016

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	13	1.68177	0.3134
CPI does not Granger Cause FDI		0.79488	0.5853

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:20

Sample: 2000 2016

Lags: 5

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	12	1.40198	0.5631
CPI does not Granger Cause FDI		0.95563	0.6468

### C.3 Filipina

#### 1. Variabel GDP ke CPI

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:23

Sample: 2000 2016

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	16	0.10549	0.7505
CPI does not Granger Cause GDP		2.21237	0.1608

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:23

Sample: 2000 2016

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	15	0.81469	0.4701
CPI does not Granger Cause GDP		1.56639	0.2560

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:23

Sample: 2000 2016

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	14	1.20537	0.3758
CPI does not Granger Cause GDP		2.31642	0.1623

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:24

Sample: 2000 2016

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	13	0.65051	0.6564
CPI does not Granger Cause GDP		1.84611	0.2836

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/02/17 Time: 23:24

Sample: 2000 2016

Lags: 5

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GDP does not Granger Cause CPI	12	0.44419	0.8062
CPI does not Granger Cause GDP		1.65306	0.5281

## 2. Variabel FDI ke CPI

### Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/05/17 Time: 21:48

Sample: 2000 2016

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	16	0.95313	0.3467
CPI does not Granger Cause FDI		3.34122	0.0906

### Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/05/17 Time: 21:49

Sample: 2000 2016

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	15	1.08228	0.3754
CPI does not Granger Cause FDI		2.20355	0.1611

### Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/05/17 Time: 21:50

Sample: 2000 2016

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	14	1.03698	0.4331
CPI does not Granger Cause FDI		1.54759	0.2849

### Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/05/17 Time: 21:50

Sample: 2000 2016

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	13	0.96659	0.5127
CPI does not Granger Cause FDI		4.01488	0.1034

### Pairwise Granger Causality Tests

Date: 10/05/17 Time: 21:51

Sample: 2000 2016

Lags: 5

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
FDI does not Granger Cause CPI	12	0.98216	0.6407
CPI does not Granger Cause FDI		4.02060	0.3609